

e-news letter

AGUSTUS III 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



RAFLI

Nikmat Kemerdekaan
Wajib Dirasakan
**Segenap Rakyat
Indonesia**



Merdeka Lahir Bathin



Alhamdulillah rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, saat ini Indonesia telah menginjak usia 75 tahun kemerdekaan. Sungguh bukan usia yang tidak muda lagi, namun darinya kita lihat tidak kunjung matang. Karena ada negara yang kemerdekaannya berbeda dua hari dari kita, namun kini sudah melonjak menjadi negara yang terampil dan pandai mencapai berbagai hal. Mampu melakukan penetrasi hingga ke berbagai penjuru dunia dan diterima sebagai mitra kerja yang setara, tidak perlu menajakan hegemoni serta dominasi. Karena mereka paham bahwa dijajah perih, ditindas pedih. Sakit hingga sembilu.

Di usia 75 tahun kita bisa jadi terbebas dari cengkaman penjajah, namun masih sering diliputi perasaan terjajah dan belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tengok saja data dan fakta yang ada: Pekerjaan bagi warga negara sendiri sangat sulit, disaat bersamaan banjir Tenaga Kerja Asing (TKA) merambah hingga pelosok negeri. Jikapun bekerja dirantai minim proteksi dan

tidak memiliki daya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mencapai 276.553 orang pada tahun 2019. Mari berdikari.

Di usia 75 tahun narasi yang dielukan masih sama sebagaimana saat kita mengusir penjajah. Bahwa kita harus Bersatu dan berpadu. Padahal gagasan perpaduan jauh sebelum kemerdekaan dikumandangkan di tahun 1928. Sudah menjadi bagian dalam kenegaraan kita (blend as nation) Bertumpah darah satu, Berbangsa satu, dan berbahasa satu : Indonesia. Lalu mengapa kini masih saja ada yang mengejar-gejar komitmen Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila harga mati. Rumitnya dibenturkan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ruh dasar Bhineka Tunggal ika dan Pancasila. Polarisasi cukup di masa lalu, karena hari ini kita kolaborasi terlebih di masa pandemi. Mari bersinergi.

Kita sudah sepatasnya bertumbuh, bukan berjalan ditempat, dari Bhinneka menjadi satu jiwa. Dari Pancasila menjadi satu gerak. Gerak dan nyawa berpadu merdu menjadi Indonesia Raya. Bukan kemudian menghadirkan dikotomi terus menerus,

padahal tidak pernah terjadi kerumitan sebelum era post truth ini. Kita baik-baik saja selama ini sebelum ada pihak-pihak yang senang membenturkan agama, budaya dan bangsa. Mari berkolaborasi.

Saat ini kepemilikan sumber daya alam (SDA) hanya dipegang segelintir pihak yang teridentifikasi tidak lebih dari 2 persen penduduk Indonesia. Menurut Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Mari kita hentikan.

Distribusi kekayaan berputar-putar dipusarkan kekuasaan yang sama, janganakan menarik rakyat biasa dalam pusaran tersebut karena faktanya sekedar buih saja enggan menyebar hingga ke rakyat jelata. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin papa. Pemerataan dan kesejahteraan masih menjadi ilusi dan narasi yang ada di papan reklame, diulang-ulang dalam pidato diatas mimbar dan disebarluaskan hingga pelosok negeri. Akhirnya bukan menjadi inspirasi, namun rasa iri dan diskriminasi eksistensi. Mari kita cukupkan.



Kita sudah sepatasnya bertumbuh, bukan berjalan ditempat, dari Bhinneka menjadi satu jiwa. Dari Pancasila menjadi satu gerak. Gerak dan nyawa berpadu merdu menjadi Indonesia Raya. Bukan kemudian menghadirkan dikotomi terus menerus, padahal tidak pernah terjadi kerumitan sebelum era post truth ini. Kita baik-baik saja selama ini sebelum ada pihak-pihak yang senang membenturkan agama, budaya dan bangsa. Mari berkolaborasi

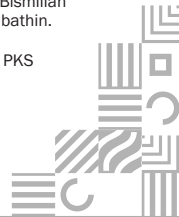


Kepedulian menunggu bantuan bukan mendorong pemberdayaan. Pun bantuan diberikan sampai harus menunggu kemasan yang dicetak tebal, padahal darinya hanya bertahan tidak lebih dari satu bulan. Pada akhirnya rakyat bekerja untuk diri sendiri, sendiri-sendiri dan tidak kunjung mandiri.

Merdeka harus mampu menembus ruang lahir dan

bathin, agar pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan tanpa beban dan keadilan tanpa cela. InshaAllah bisa, ada banyak contoh disekitar kita. Bismillah Merdeka lahir bathin.

HUMAS Fraksi PKS



**HUT ke-75 RI,**

Rafli: Nikmat Kemerdekaan Wajib Dirasakan oleh Segenap Rakyat Indonesia



Aceh (17/08) — Usia 75 tahun Indonesia Merdeka ditandai dengan peringatan 17 Agustus 2020 menjadi momentum yang merefleksikan perjalanan panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati gejala dan problem yang kompleks ditengah proses adaptasi tatanan kehidupan baru dalam dinamika pandemi global covid-19.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal dapil 1 Aceh, Rafli memaknai usia panjang Bangsa Indonesia sebagai alarm untuk melakukan evaluasi lebih dalam tentang kematangan sebuah bangsa besar yang harus mampu memberi makna bagi segenap rakyatnya.

"Usia Panjang Bangsa Indonesia hendaknya menjadi tolak ukur dan evaluasi mendalam sebagai bangsa

besar. Di usia ke 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia kita harapkan menjadi sebuah kematangan yang bermakna untuk rakyat" Ujar Rafli

Ditanya mengenai arti kemerdekaan ditengah kondisi Negara Indonesia seperti saat ini, Menurut Rafli, kemerdekaan itu harus mampu memberi arti bagi rakyat, sebagai bentuk kenikmatan yang bisa dirasakan setiap personaliti rakyat Indonesia. "Jika tidak demikian, apa artinya sebuah kemerdekaan!" Tandasnya

Politisi yang juga seniman frontline etnik kontemporer yang mendunia asal provinsi berjulukan serambi mekah itu, mengibaratkan usia 75 tahun Republik Indonesia umpama seonggok pohon yang sudah matang berbuah dan bisa dinikmati hasilnya

"75 tahun usia Republik Indonesia, Jika diibaratkan sebatang pohon besar yang akarnya sudah menghujam

melekat erat kedalam Bumi, batang sudah sangat kokoh berdiri, kekuatan cabang hingga daunnya yang sudah sangat rimbun mampu mengayomi, serta buahnya sudah waktunya panen, bisa dinikmati oleh pemilik pohon itu sendiri" ungkapny.

"Begitulah semestinya kondisi negara kita diusia sekarang" Imbuh Rafli

"Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia"

Usia Panjang Bangsa Indonesia hendaknya menjadi tolak ukur dan evaluasi mendalam sebagai bangsa besar. Di usia ke 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia kita harapkan menjadi sebuah kematangan yang bermakna untuk rakyat

RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI



ayapan.com



DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA
17 Agustus 2020



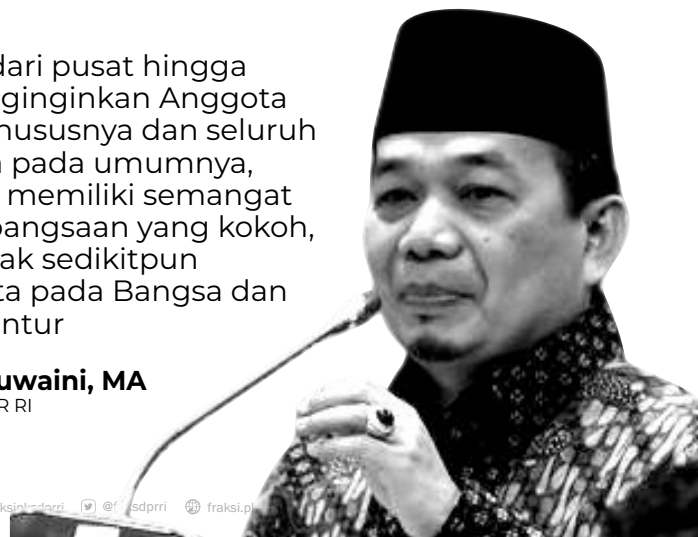
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreasi Syukuri Kemeredekaan RI

Bersama Anggota DPR RI,
dan 8 Fraksi Daerah

“Fraksi PKS dari pusat hingga daerah, menginginkan Anggota Fraksi PKS khususnya dan seluruh anak bangsa pada umumnya, benar-benar memiliki semangat dan jiwa Kebangsaan yang kokoh, sehingga tidak sedikitpun kecintaan kita pada Bangsa dan Negara ini luntur

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI





Kokohkan Nilai Kebangsaan

Fraksi PKS Gelar Kreasi Syukuri Kemerdekaan Republik Indonesia



Jakarta (17/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Kreasi Syukuri Kemerdekaan Republik Indonesia, dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Senin, (17/08).

Acara yang digagas untuk mengokohkan nilai kebangsaan ini, akan diisi dengan penyampaian Pesan Kemerdekaan, Reportase Kemerdekaan dan Kreasi Kemerdekaan dari 17 Anggota Fraksi PKS DPR RI, 8 Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten/Kota, selama 4,5 Jam yang disiarkan secara live streaming.

Dalam sambutan pembukaan, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyampaikan acara Kreasi Syukuri Kemerdekaan Republik

Indonesia ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah mengaruniakan Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

"Ini merupakan wujud syukur, atas anugerah Kemerdekaan yang Allah berikan. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, maka seyogyanya kita isi Kemerdekaan ini dengan turut berkontribusi membangun bangsa yang kita cintai ini", ungkap Anggota DPR asal Dapi Banten 1 ini.

Jazuli melanjutkan, disamping itu, acara Kreasi Syukuri Kemerdekaan juga sebagai bentuk tanggungjawab konstitusional dan moral, untuk terus mengokohkan nilai-nilai Kebangsaan pada diri Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Pusat hingga Daerah, dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

"Fraksi PKS dari pusat hingga daerah, menginginkan Anggota Fraksi PKS khususnya dan seluruh anak bangsa pada

umumnya, benar-benar memiliki semangat dan jiwa Kebangsaan yang kokoh, sehingga tidak sedikitpun kecintaan kita pada Bangsa dan Negara ini luntur," tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Selanjutnya, dengan Kreasi Syukuri Kemerdekaan ini, Fraksi PKS mengharapkan agar semua elemen bangsa Indonesia tanpa terkecuali, memiliki pemahaman yang kokoh dan utuh tentang perjuangan para pendahulu bangsa, sehingga kita bisa mencontoh sikap dan semangat mereka mempertahankan Kemerdekaan ini.

"Ketika kita bisa mencontoh para pendahulu bangsa, maka kita pun akan punya semangat dan motivasi yang sama, dalam mengorbankan apa yang kita miliki untuk bangsa dan negara tercinta," terang Jazuli.

Ini merupakan wujud syukur, atas anugerah Kemerdekaan yang Allah berikan. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, maka seyogyanya kita isi Kemerdekaan ini dengan turut berkontribusi membangun bangsa yang kita cintai ini",

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI





Tasyakuran Kemerdekaan Bersama Tokoh Lintas Agama

PKS Jaga Konsensus Bangsa



**DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA**
17 Agustus 2020

Jakarta (18/08) — Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman merasa bersyukur dengan eksistensi kemerdekaan Indonesia hingga 75 tahun. Sohibul Iman menyebut kemerdekaan hingga 75 tahun di tengah bangsa yang sangat majemuk dari suku, agama, budaya dan bangsa sebagai keajaiban dunia.

"Bila dilihat betapa majemuknya Indonesia dari sisi agama, suku, budaya dan bahasa maka mampu bertahan selama 75 tahun merupakan miracle of the world. Tidak ada negara yang seplural Indonesia bisa bertahan hingga 75 tahun," ungkap Sohibul Iman dalam Tasyakuran dan Renungan Kemerdekaan bersama Tokoh Lintas Agama secara virtual, Senin (17/08/2020) malam.

Sohibul Iman mencontohkan negara Yugoslavia yang juga terdiri dari beberapa etnik kini sudah tercerai-berai. Bagi Sohibul eksistensi kesatuan bangsa ini merupakan karunia dari Allah SWT sekaligus ikhtiar dari founding father yang meletakkan dasar hidup bernegara.

"Indonesia bisa menyelenggarakan kehidupan berbangsa di tengah pluralitas karena berpegang teguh pada common platform seperti Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Bendera Merah Putih dan banyak konsensus dasar lain yang diletakkan pejuang dan founding father," ungkap doktor alumni Jepang ini.

Mantan wakil ketua DPR RI ini menegaskan atas dasar itulah PKS akan terus menjaga konsensus bersama itu dalam kehidupan berbangsa. PKS, kata dia, akan terus berjuang mempertahankan konsensus dasar bernegara menjadi pegangan semua anak bangsa.

Pria asal Tasikmalaya ini menambahkan Indonesia memang ditakdirkan menjadi negara yang majemuk. Ketika kita lahir, pluralitas di Indonesia sudah ada. "Pluralitas di Indonesia adalah taken for granted, harus kita terima sejak lahir," papar dia.

Sementara itu di sisi lain menciptakan kebersamaan dan persatuan adalah sesuatu yang harus diupayakan, bukan hal yang bersifat otomatis.

"Persatuan sifatnya harus kita upayakan. Malam ini kita

adalah tasyakuran dan renungan kemerdekaan dari tokoh lintas agama dalam upaya mewujudkan semangat persatuan bangsa dalam konteks kehidupan antarumat beragama," ungkap mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti menilai ada banyak capaian sekaligus catatan perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga menginjak 75 tahun.

"Dinamika kita sebagai bangsa sangat banyak. Alhamdulillah kita sebagai bangsa sudah mencapai tujuan merdeka, bersatu dan berdaulat. Tetapi dalam catatan, kita belum menjadi negara dengan tatanan yang adil dan belum menjadi negara makmur," terang Mu'ti.

Secara khusus Mu'ti menyikapi jika tidak ada keraguan tentang nasionalisme PKS untuk tetap menegaskan Pancasila dan NKRI sebagai penyangka bangsa yang majemuk ini.

Selengkapnya kunjungi
fraksi.pks.id

Persatuan sifatnya harus kita upayakan. Malam ini kita adalah tasyakuran dan renungan kemerdekaan dari tokoh lintas agama dalam upaya mewujudkan semangat persatuan bangsa dalam konteks kehidupan antarumat beragama

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

Presiden PKS





Presiden PKS: Selama 5 Bulan Pemerintah Gagal Mitigasi Pandemi & Pulihkan Ekonomi



Jakarta (17/08) — Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menilai pemerintah gagal mengelola hubungan terkait strategi melakukan mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi selama lima bulan berjalan.

"Tampak sekali bahwa pemerintah gagal paham dalam mengelola hubungan dalam bagaimana strategi melakukan mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Sohibul Pidato Kebangsaan dalam Upacara Virtual Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia, di Halaman DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2020).

Para ahli kesehatan dan ekonomi, ujar dia, telah sepakat bahwa kinerja ekonomi adalah fungsi dari kemampuan kita dalam menangani permasalahan Pandemi.

"Artinya, jika Pemerintah

semakin cepat dan tepat mengatasi Pandemi, maka ekonomi akan semakin cepat pulih. Dan sebaliknya, jika Pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani Pandemi maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya," ungkap dia.

Ia menjelaskan bahwa bangsa ini seharusnya memiliki keyakinan yang sama bahwa ekonomi cepat atau lambat akan pulih kembali (rebound) sedangkan warga dan tenaga medis yang meninggal tidak akan bisa kembali lagi. Setiap warga yang meninggal yang diumumkan oleh pemerintah bukanlah angka statistik saja.

"Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi," ungkap dia.

PKS sudah jauh-jauh hari memperingatkan pemerintah melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tegaskan bahwa dalam penanganan Covid-19 ini, kita harus berfokus pada penanganan kesehatan. Jangan korbakan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan. Ini akan menjadi double mistake. Gagal mengendalikan pandemi. Gagal memulihkan ekonomi. Ternyata kebijakan pemerintah hari ini membuahkan hasil yang menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbelengkalai, kurva pandemi kita tetap naik. Sisi lain, kondisi ekonomi kita makin terpuruk," tegas Sohibul.

Kita tegaskan bahwa dalam penanganan Covid-19 ini, kita harus berfokus pada penanganan kesehatan. Jangan korbakan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

Presiden PKS





Memperingati HUT ke-75 RI

Nurhasan Upacara dan Ziarah Makam Pahlawan Nasional



Majalengka (19/08) — Memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke -75, Nurhasan Zaidi melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional K.H. Abdul Halim di Komplek Pondok Pesantren Santi Asromo, Desa Pasirayu, Kecamatan Sindang, Majalengka sehari sebelum peringatan HUT RI, Ahad, (16/08/2020).

Acara ziarah dan tabur bunga di makam KH. Abdul Halim tersebut dilakukan bersama Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Majalengka dengan diawali Upacara penghormatan sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan.

"Ziarah, do'a dan tabur

bunga ini kita lakukan sebagai bentuk bakti dan hormat kita pada para pahlawan yang gigih berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Kita bangga dan bersyukur bahwa Majalengka dan Indonesia memiliki Pahlawan Nasional KH. Abdul Halim, semoga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangannya", ungkap Nurhasan.

Nurhasan yang juga Ketua Umum Persatuan Ummat Islam (PUI) ini juga menegaskan bahwa gagasan perjuangan KH Abdul Halim untuk menjaga persatuan umat demi merdekanya bangsa dari penjajahan dan kebodohan, menjadi salah satu pesan perjuangannya.

"Kita harap kegiatan rutin tahunan di setiap peringatan HUT RI seperti ini, yakni ziarah dan do'a ke makam pahlawan selalu dijaga dan dilestarikan. Ini kita lakukan sebagai wujud

rasa syukur dan bentuk penghargaan kita atas jasa para pahlawan yang telah mendahului. Semoga nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dapat senantiasa terpupuk dari kegiatan ini", pungkasnya.

"Ziarah, do'a dan tabur bunga ini kita lakukan sebagai bentuk bakti dan hormat kita pada para pahlawan yang gigih berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Kita bangga dan bersyukur bahwa Majalengka dan Indonesia memiliki Pahlawan Nasional KH. Abdul Halim, semoga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangannya"

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI





75 tahun Indonesia Merdeka,

Iskan: Apa kabar kemiskinan di Indonesia?



Medan (17/08) — Hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia di sejumlah wilayah memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke 75 tahun.

Peringatan ini seyogyanya ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera di sekolah-sekolah maupun instansi pemerintah.

Selanjutnya Seyogyanya juga kegiatan peringatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan di tingkat RT, RW, Desa (kelurahan) hingga pemerintah pusat di Jakarta.

Seluruh rakyat larut dengan kegembiraan yang mendalam atas perjuangan dan jasa para pahlawan yang telah memerdekakan bangsanya.

Namun, bangsa ini sedang mengalami dan berjuang melawan covid -19, berbeda peringatan di tahun-tahun sebelumnya, diberapain instansi kenegaraan, virtual

conference menjadi salah satu cara hadir dan ikut andil dalam memperingati upacara pengibaran bendera merah putih dihari ini.

Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menilai, dalam memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia di masa kini, tentunya punya cara yang berbeda.

"Dahulu para penjajah itu kita usir dengan senjata bambu runcing dan semangat persatuan, siap berkorban darah dan nyawa. Namun, saat ini, ditengah pandemi seperti ini, kita juga harus mengambil semangat persatuan itu, bergotong royong dan saling memikul beban bersama-sama untuk menghentikan penularan virus Covid-19. Setiap hari banyak nyawa yang melayang, baik itu masyarakat maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya." Ujar iskan

Politisi PKS ini juga menyoroti angka kemiskinan yang makin menukik tajam meningkatannya.

"Betul memang, virus Covid-19 ini menjadi sebab

utamanya, sehingga pertumbuhan ekonomi juga amblas di 2 kuartal (kuartal pertama 2% dan kuartal kedua -5,23%), dan kita akui Indonesia saat ini berada dijurang resesi," urainya.

Selain itu, lanjut iskan, langkah pemerintah yang terkesan lambat juga menjadi faktor lainnya.

"Angka kemiskinan di Indonesia diprediksi bank Dunia akan bertambah sebesar 2%-3,5% artinya sebesar 5 - 10 juta orang miskin baru tercatat diakhir tahun 2020. Miris kan...saat ini aja ada 26,5 juta orang miskin di Indonesia," pungkask iskan.

Pembangunan ekonomi di Indonesia, lanjut Iskan, mempunyai hubungan yang erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar terciptanya sebuah kesejahteraan.

"Nah Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu, pemerintah harus serius dalam menangani masalah kemiskinan," terang Iskan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kami menghimbau pemerintah agar Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk dapat ditingkatkan lagi"

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI





DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA
17 Agustus 2020



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

Kepada 17 Anggota DPR RI,
dan 8 Fraksi Daerah atas
partisipasinya dalam Acara
Kreasi Kemerdekaan
Indonesia.





Maknai 75 Tahun Indonesia Merdeka

Nevi: Merdeka Hakiki untuk Hidup Lebih Baik di seluruh Pelosok Negeri



Padang (17/08) — Merdekahalu Negriku. Merdeka yang Hakiki, bukan saja merdeka dari kekangan Penjajahan bangsa lain. Tapi Merdeka dalam keseluruhan dalam menjalani kehidupan. Hal ini dikatakan oleh Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina.

Penyampaian pidato Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR pada Jum'at, (14/8/2020) oleh Legislator asal Sumbar ini dinilai isinya baik.

"Pidato yang menjadi ritual bangsa ini untuk merencanakan kehidupan bernegara yang juga sebagai pengingat moment bangsa ini mendeklarasikan kebebasan, kemandirian dan kedaulatan. Tapi semua isi yang baik-baik dalam pidato ketika usai moment kemerdekaan, realisasinya hilang begitu saja,"

pungkas Nevi.

Nevi meminta kepada Pemerintah, agar semua pidato Presiden dalam rangka sidang tahunan di depan seluruh Anggota DPR MPR ini mesti mampu diikuti dengan kerja nyata.

"Rakyat saat ini butuh pelindung sejati dari sosok pemimpin bangsa ini. Bukan melindungi dari serangan penjajah. Tapi pelindung akan serangan resesi ekonomi," ungkapnya.

Nevi menambahkan, Keterpurukan sistem kesehatan dan Kesempatan memperoleh pendidikan yang baik dan merata di seluruh negeri menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

"Rakyat Indonesia tidak butuh Bukan buaian kata-kata manis yang membuat terlena. Tapi negeri ini sangat tinggi ketimpangannya baik dari sisi pemerataan berdasar wilayah, maupun dari sisi kualitas hidup orang-per orang. Bukti nyatanya, rakyat miskin bangsa ini sangat besar dari sisi jumlah maupun

dari sisi tingkat kehidupannya yang biasa dilihat dari IPMnya (Indeks Pembangunan Masyarakat", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, begitu banyak pertanyaan dan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Sebuah pertanyaan besar yang hingga belum mampu di jawab adalah, begitu subur dan indahny alam negeri ini, tapi tidak ada kesejahteraan yang manaungi rakyatnya.

"Impor pangan, energi dan perangkat kesehatan masih sangat marak. Tongkat dilempar jadi tanaman menjadi tidak relevan bukan karena alamnya, tapi karena manusianya yang menginjak buminya," terangnya.

Nevi melanjutkan, bahwa negeri yang subur, makmur penuh keadilan yang tersirat dari Firman Allah baldatun thayibatun wa rabbun ghofur seharusnya tertuju pada Indonesia ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Rakyat Indonesia tidak butuh Bukan buaian kata-kata manis yang membuat terlena. Tapi negeri ini sangat tinggi ketimpangannya baik dari sisi pemerataan berdasar wilayah, maupun dari sisi kualitas hidup orang-per orang. Bukti nyatanya, rakyat miskin bangsa ini sangat besar dari sisi jumlah maupun dari sisi tingkat kehidupannya yang biasa dilihat dari IPMnya (Indeks Pembangunan Masyarakat")

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI





Refleksi Kemerdekaan RI disaat Covid-19,

Anis: Mari Bersama Keluar dari Kondisi Pandemi



**DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA**
17 Agustus 2020

Jakarta (17/08) — Kemerdekaan Indonesia merupakan buah dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah memberikan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan.

Mereka mengatakan, kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Para pendahulu mengatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan, jauh lebih berat daripada meraihnya.

Tugas lebih berat lagi adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang mensejahterakan rakyat.

"Karena ini mengisi kemerdekaan sebagaimana amanat Allah dan amanat para pendahulu kita adalah bagaimana kita menjadi negara yang mensejahterakan rakyatnya, melindungi segenap rakyat, dan menjamin warganya hidup dengan layak", demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati di Jakarta (17/08).

Memberi ulasan mengenai

kemerdekaan di masa pandemic, Anis mengatakan bahwa di masa pandemic ini, rakyat belum mendapatkan hak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Betapa banyak rakyat kehilangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan.

"Rakyat kita saat ini belum bisa dikatakan menikmati kemerdekaan karena untuk menghidupi keluarga saja, mereka belum bisa. Dan mereka belum mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah," ungkapnya.

Dari sisi Pendidikan, Anis menggaris bawahi ditutupnya sekolah-sekolah dan menjalankan pendidikan jarak jauh dengan kebutuhan kuota yang tidak sedikit, menjadikan Pendidikan saat ini tidak bisa dikatakan berhasil.

Memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari saja sangat susah bagi mereka, apalagi harus memikirkan biaya tambahan untuk membeli kuota.

"Hal yang sangat memberatkan untuk masyarakat bawah dan menegaskan bahwa mereka belum merdeka," tegas Anis.

Melihat dari sisi ekonomi

dimana pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi negara kita minus, Anis mengatakan bahwa kondisi ekonomi kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja serta dampaknya sangat terasa pada masyarakat.

Adapun upaya pemerintah dengan memberikan berbagai insentif kepada kelompok masyarakat tertentu seperti kepada kelompok masyarakat terkena PHK massal, menurut Anis belum berdampak signifikan untuk stabilisasi ekonomi.

"Karena pemberian insentif itu, tidak disertai dengan upaya pemerintah menekan kenaikan-kenaikan kebutuhan dasar lainnya," urainya.

Anis mencontohkan kenaikan tarif listrik, kenaikan iuran BPJS dan kenaikan harga gas, sangat memberatkan masyarakat. Sehingga insentif yang mereka dapatkan tidak akan terasa apa-apa karena mereka gunakan untuk menutupi kenaikan kebutuhan dasar tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Merdeka saat ini adalah bagaimana kita bekerja keras dan bergotong royong untuk keluar dari pandemic. Pemerintah harus fokus melakukan upaya-upaya untuk keluar dari pandemic dan mengantisipasi imbasnya yang meruntuhkan semua sektor. Menitikberatkan kepada masalah ekonomi tidak menyelesaikan masalah

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI





Syukuri Kemerdekaan dengan Merawat dan Membangun Bangsa Indonesia



Jakarta (17/08) — Pada hari bersejarah bagi bangsa Indonesia ini, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Senin, (17/08).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, Kemerdekaan yang diberikan Allah SWT sudah seharusnya disyukuri segenap anak bangsa.

"Alhamdulillah kita sudah menikmati kemerdekaan ini selama 75 tahun, tentunya hal ini wajib kita syukuri, karena dengan nikmat kemerdekaan ini kita bebas dan merdeka untuk melakukan segala hal," ungkap Habib Aboe dalam acara Kreasi Syukuri Kemerdekaan yang digelar Fraksi PKS DPR RI.

Bendahara Fraksi PKS ini menambahkan, diumur ke-75 tahun ini, idealnya kita bisa mendapat Pendidikan, bisa mengakses Kesehatan, bisa

berkumpul dan berserikat, kita juga bebas mengeluarkan pendapat.

"Akses pendidikan dan kesehatan yang mudah bagi anak bangsa, menjadi perhatian penting Pemerintah di hari Kemerdekaan ini. Juga yang tak kalah penting yakni, bebasnya siapapun untuk menyampaikan pendapat di muka umum", terangnya.

Lebih lanjut Habib menyampaikan, syukur atas nikmat kemerdekaan ini dapat kita wujudkan dalam tiga hal.

"Pertama secara harfiah, kita ucapkan syukur Alhamdulillah, inilah ungkapan terima kasih kita kepada Allah SWT, selain itu kita panjatkan doa agar Allah SWT senantiasa merawat bangsa dan negara ini, kita mohonkan agar kedaulatan negara ini terus dilindungi oleh yang Maha Kuasa," ungkapnya.

Kedua, imbuhnya, syukur itu dilakukan dengan merawat kemerdekaan. Yaitu dengan menjaga sendi-sendi kedaulatan bangsa.

"Kita memastikan bahwa

negara ini diselenggarakan sesuai dengan konstitusi, kita pastikan arahnya tepat sesuai dengan cita-cita bangsa menuju Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang paling penting, kita semua mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan," terang Anggota DPR RI Asal Dapil Kalsel 1 ini.

Ketiga, katanya, Syukur atas kemerdekaan kita laksanakan dengan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan.

"Kita isi kemerdekaan ini dengan upaya sekuat tenaga untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Akses pendidikan dan kesehatan yang mudah bagi anak bangsa, menjadi perhatian penting Pemerintah di hari Kemerdekaan ini. Juga yang tak kalah penting yakni, bebasnya siapapun untuk menyampaikan pendapat di muka umum

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI





Refleksi Kemerdekaan,

Johan: Impor Pangan Bentuk Penjajahan Baru bagi Kemandirian Pangan



**DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA**
17 Agustus 2020

Jakarta (15/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, saat ini Pemerintah belum tegas menolak impor pangan sebagai bagian dari membangun kemandirian pangan Indonesia.

Hal ini disampaikan Johan sebagai refleksi pada hari Kemerdekaan kita bahwa ketergantungan impor pangan bisa dimaknai sebagai bentuk penjajahan baru bagi kemandirian dan kedaulatan pangan kita.

Menurut Johan, saat ini sistem dunia telah membentuk relasi ketergantungan suplay pangan yang selalu dikuasai oleh negara-negara maju, pola hegemoni pangan untuk menciptakan ketergantungan pangan adalah lahir dari semangat kolonialisme dan

imperialisme.

"Maka saya mengingatkan pada momentum 75 tahun Indonesia merdeka, agar kita segera melepaskan diri dari cengkraman penjajahan pangan, yakni dengan cara focus membangun kemandirian dan kedaulatan pangan kita", ujar Johan.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa impor komoditas pangan kita mulai melonjak drastis itu sejak 2014 hingga sekarang, pada tahun 2014 impor untuk delapan komoditas pangan saja telah mencapai 22 juta ton dan bahkan pada tahun 2018 impor pangan mencapai lebih dari 28 juta ton.

"Pada tahun 2020 ini, di bulan Maret lalu saja terjadi peningkatan impor hortikultura, seperti buah dan bawang putih dari China dan negara lainnya", papar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini ingin mengingatkan kita terhadap pesan dan amanat dari Presiden Soekarno pada

saat acara peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI yang merupakan cikal bakal Institut Pertanian Bogor pada tahun 1952 di Bogor.

"Pertanian merupakan persoalan penting bagi bangsa dan negara, serta masalah ketahanan pangan merupakan persoalan hidup dan mati yang jika diabaikan maka kita akan mengalami malapetaka," pungkasnya.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Johan, maka Pemerintah seharusnya selalu berupaya membangun kemandirian pangan dalam negeri.

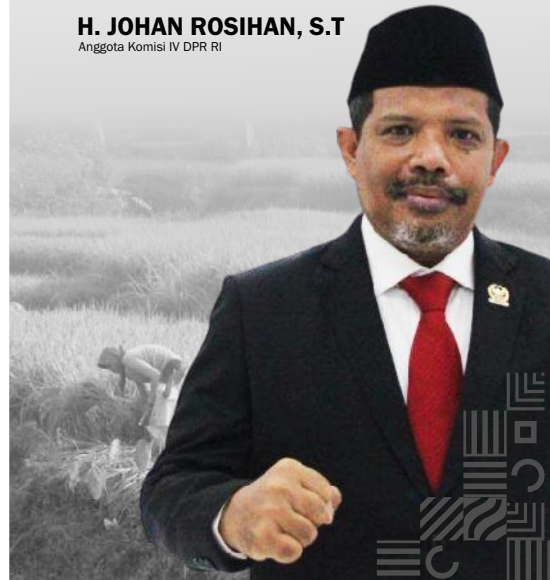
"Pemerintah harus juga meningkatkan produksi pangan dalam negeri, menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup dan mutu yang layak serta berbagai kebijakan komprehensif untuk menghentikan ketergantungan impor pangan," tegas Johan.

Selengkapnya kunjungi
fraksi.pks.id

Saya mengingatkan pada momentum 75 tahun Indonesia merdeka, agar kita segera melepaskan diri dari cengkraman penjajahan pangan, yakni dengan cara focus membangun kemandirian dan kedaulatan pangan

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI





Sambut Hari Kemerdekaan RI

Aleg PKS: Kita Harus Optimis, Hari Esok akan Lebih Baik



Jakarta (17/08) — Dalam kondisi prihatin seperti sekarang ini, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 harus dijadikan momentum membangun rasa persatuan, kebersamaan dan semangat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengajak seluruh komponen masyarakat dan bangsa saling bekerjasama mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

"Kita harus bersatu padu mengatasi persoalan bangsa, mulai dari masalah pandemi Covid-19 yang sudah menelan korban 5.600 jiwa, hingga masalah kontraksi ekonomi yang saat ini tumbuh negatif 5,3% serta ancaman resesi ekonomi," tutur Mulyanto.

Mulyanto juga meminta Pemerintah untuk lebih peduli mengokohkan rasa kebersamaan dalam

masyarakat, sebagai modal utama bangsa ini mengatasi berbagai tantangan yang ada.

"Diakui atau tidak, saat ini masyarakat kita tengah terbelah, sebagai eksekutif dari pilpres yang lalu. Karenanya di hari kemerdekaan inilah Pemerintah seharusnya dapat menciptakan suasana kerukunan, kedamaian dan rasa persatuan. Bukan malah mempertajam perbedaan dengan membiarkan keberadaan buzzer-buzzer media sosial yang sering memprovokasi masyarakat," ujar Mulyanto.

Untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan tersebut Mulyanto mengingatkan Pemerintah untuk lebih menjaga keseimbangan pembangunan, baik dalam aspek spiritual maupun material, seperti yang diamanahkan para pendiri bangsa (founding fathers).

"Menurut Bung Hatta, sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) mencerminkan aspek spiritualitas itu. Sementara sila ketiga, sila keempat dan sila

kelima mencerminkan aspek materialitasnya," terangnya.

Aspek spiritualitas ini, lanjut Mulyanto, akan menyinari pembangunan aspek materialnya. Bahkan sila pertama Pancasila, yakni 'Ketuhanan Yang Maha Esa' menjadi ruh bagi sila-sila lainnya," tandasnya.

Ini, imbuhnya, sesuai dengan syair dalam lagu Kebangsaan Kita 'Indonesia Raya', yakni 'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya'.

"Kata 'jiwa', kita sebut lebih dahulu dari 'badan'. Kita harus membangun aspek spiritualitas bangsa ini, agar kokoh untuk kemudian menjadi landasan dalam membangun peradaban material Indonesia yang maju, unggul dan bermartabat," ujar Mulyanto.

Karena itu kita bersyukur dengan predikat, bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman dan bertakwa. Dan memang demikianlah fakta sosialnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Salah satu indikator, bahwa akal-jiwa bangsa ini masih sehat dan kita layak optimis dapat kita lihat dari bagaimana sikap penolakan masyarakat luas terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) ataupun RUU BPPI (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) akhir-akhir ini

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI





Pimpin Upacara HUT ke-75 RI,

Netty: Pemerintah Jangan Khianati Pahlawan dan Janji Kemerdekaan



Cirebon (17/08) — Netty Prasetyani Aher, Wakil Ketua FPKS DPR RI memimpin upacara peringatan HUT RI ke-75 di halaman kantor DPD PKS Kabupaten Cirebon, Senin, (17/08).

"Kita tegaskan kecintaan PKS kepada republik ini dengan terus bekerja melayani rakyat. Tunjukkan bahwa kader PKS mencintai NKRI ini dengan tulus. Tidak boleh ada orang yang meragukan kecintaan kita terhadap Indonesia," ungkap Netty dihadapan para anggota DPRD kabupaten, pengurus DPD dan segenap kader PKS.

Netty meminta segenap kader dan simpatisan PKS agar tetap semangat, terus berkontribusi dan meningkatkan kewaspadaan di tengah merebak-

nya wabah Covid-19.

"Hari Kemerdekaan ditandai dengan 142.081 kasus terkonfirmasi di seluruh Indonesia dan ditemukannya kluster-kluster baru transmisi Covid-19 di berbagai daerah. Hal ini sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani," ujarnya.

Oleh karena itu, dengan semangat perjuangan merebut kemerdekaan, saya minta Pemerintah bersungguh-sungguh melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu memberikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyat.

"Jangan khianati para pahlawan yang telah gugur. Pemerintah jangan sampai terus mendzalimi rakyat dengan sikap dan kebijakan di berbagai bidang yang tidak pro rakyat," ucap tokoh perempuan Jawa Barat ini.

Setelah kegiatan upacara, dilakukan lomba membaca teks proklamasi dan dilanjutkan dengan penampilan seni Tari

Topeng khas Cirebon.

"Tari Topeng ini dibawakan oleh anak muda pelajar Cirebon sebagai bentuk kecintaan terhadap seni budaya Indonesia dengan segala keragaman di dalamnya. Dengan mencintai budaya lokal diharapkan terbagun wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang kokoh," lanjut aleg dail Jabar 8 ini.

Menurut Netty, seni budaya adalah salah satu dari tiga aspek penting dalam kehidupan selain agama dan ilmu pengetahuan.

"Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan 3 hal: Agama, ilmu, dan seni.

Agama membuat hidup kita terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, seni membuat hidup menjadi indah. Kombinasi ketiganya menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang unggul dan utuh", tutup Netty.

Jangan khianati para pahlawan yang telah gugur. Pemerintah jangan sampai terus mendzalimi rakyat dengan sikap dan kebijakan di berbagai bidang yang tidak pro rakyat

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI





Sambut HUT RI ke-75

Mardani Ajak Tingkatkan Minat Terhadap Sastra



Jakarta (18/08) — Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengajak masyarakat untuk meningkatkan minat terhadap sastra. Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi daring Indonesian Leader Talks (ILT) ke-3 bertema 'Hamka, Sastra, dan Kemerdekaan' yang digelar pada Senin, (17/08/2020), pukul 19.30-21.00 WIB.

"Indonesia harus meningkatkan gairah minat kepada sastra! Sastra merupakan simbol kemajuan suatu bangsa atau peradaban," kata Mardani, Senin (17/08/2020).

Lebih lanjut, Anggota Komisi II FPKS DPR RI itu mengatakan, Pembangunan Indonesia dan Dunia tidak terlepas dari sastra.

"Begitu Penting sastra dalam kehidupan dan peradaban manusia, termasuk Indonesia dan kemerdekaannya," ujar Mardani.

Mardani juga mengatakan bahwa Pembukaan UU 45 dan Proklamasi adalah produk sastra yang mengandung kalimat kuat dan luar biasa.

"Sastra juga merupakan alat perjuangan para 'founding fathers' kita. Sastrawan juga banyak yang menjadi oposisi rezim pemerintah dan menjadikan sastra sebagai alat perjuangan," katanya.

Dengan mempelajari sastra, Mardani mengatakan politikus akan memiliki kepekaan yang lebih tinggi kepada masyarakat dan juga kepada kaum marginal sekalipun.

"Sastra bisa menjadi ruh dan jantung pembangunan Indonesia. Dengan mempelajari sastra, politisi akan memiliki sensibilitas dan kepekaan yang tinggi kepada sesama manusia dan alam," katanya.

Mardani juga mendapatkan usulan aspirasi untuk memperjuangkan pengurangan pajak buku agar arah penulis buku semakin meningkat. Selain itu, ada usulan lain beasiswa dan

penghargaan penulis buku untuk memacu semangat pada penulis untuk menulis buku buku lebih banyak.

"Saya setuju sekali usulan ini! insya Allah usulan ini akan saya sampaikan ke pihak terkait" pungkasnya.

Dalam kedisi ke-3 ini, selain Mardani, juga diisi oleh; Rocky Gerung, Katrin Bandel (Penulis Buku 'Sastra, Nasionalisme Pascakolonialitas'), Akmal Nasery Basral (Penulis 'Sang Pencerah', 'Hamka: Setangkai Pena di Taman Pujangga').

"Sastra bisa menjadi ruh dan jantung pembangunan Indonesia. Dengan mempelajari sastra, politisi akan memiliki sensibilitas dan kepekaan yang tinggi kepada sesama manusia dan

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI





Peringati HUT Kemerdekaan RI di Masa Pandemi

Toriq Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan



**DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA**
17 Agustus 2020

Tasikmalaya (18/08) — Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengungkapkan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke 75 tahun kali ini terasa berbeda. Wabah pandemi dan bayang-bayang resesi ekonomi mewarnai kehidupan bangsa Indonesia.

“Detik-detik Peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini terasa berbeda dengan tahun sebelumnya. Wabah pandemi dan dampak resesi ekonomi membayangi kita. Walau demikian kita tidak sendiri, hampir seluruh negara di dunia merasakannya”, ungkapnya.

Anggota Komisi I ini mengajak untuk merenungi kemerdekaan yang diperjuangkan dengan begitu banyak pengorbanan. Betapa panjang

masa penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dan masyarakatnya pada saat itu.

“Ratusan tahun bangsa Belanda menjajah bumi pertiwi, kemudian bangsa Jepang dan Inggris yang juga pernah menjajah bangsa kita. Namun semangat untuk meraih kemerdekaan dan menjadi negara yang bebas untuk menentukan nasibnya tidak pernah padam”, tegas Toriq.

Semangat para Ulama dan Rakyat Indonesia untuk merdeka dan terus berjuang pada saat itu tidak berhenti walau begitu banyak cucuran keringat, air mata, dan darah yang telah tumpah di Bumi Pertiwi, demi membebaskan diri dari penghambaan manusia kepada manusia penjajah.

“Entah berapa ribu nyawa dipersembahkan untuk kemerdekaan ini. Tapi pahlawan-pahlawan kita tidak pernah menyerah dengan keadaan dan terus berjuang hingga Allah SWT

menganugerahkan kemerdekaan pada kita, tepatnya 75 tahun yang lalu”, ungkap Toriq.

Toriq mengajak Rakyat Indonesia untuk meneladani para pahlawan bangsa dalam menghadapi ujian pandemi Covid-19 saat ini. Sebagaimana para pahlawan bangsa dalam menghadapi ujian penjajahan dari bangsa lain saat itu.

“Walaupun saat ini keadaan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja akibat pandemi tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang untuk keluar dari berbagai permasalahan bangsa. Karena sejatinya gen kita adalah gen pejuang. Mari kita wujudkan Indonesia lebih baik dengan segala potensi yang telah Allah SWT berikan untuk bangsa kita. Allahu Akbar...Allahu Akbar....Allahu Akbar....Merdeka”, tutup Toriq.

“Walaupun saat ini keadaan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja akibat pandemi tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang untuk keluar dari berbagai permasalahan bangsa. Karena sejatinya gen kita adalah gen pejuang

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat
TAHUN BARU ISLAM



1 MUHARRAM 1442 H

Kita jadikan semangat untuk
melakukan perubahan menuju
Indonesia lebih baik

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



**DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA**
17 Agustus 2020



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Kucing pun ikut ramaikan Agustusan

Gambar disamping ini merupakan kucing kesayangan Dr. Mulyanto, Anggota Fraksi PKS Dapil Banten III. Bersama keluarganya kedua kucing ini turut “meramalkan” kegiatan lomba-lomba agustusan bareng keluarga pak Mulyanto.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIA
MAJU

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 Agustus 2020

Bersama
Kita Wujudkan
Indonesia
Lebih Baik

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Terkait RUU Omnibus Law,

Legislator PKS: Jangan Hapus Sanksi Iklan Minuman Keras dan Eksploitasi Anak

Saya mengingatkan apabila ketentuan sanksi ini dihapus, akan semakin banyak pihak yang mengiklankan produk-produk minuman keras dan zat adiktif di media radio maupun televisi

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Solo (12/08) — Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kharis Almasyahi, mengkritik penghapusan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Dalam Pasal 79 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kata Kharis, memuat sejumlah penghapusan Pasal dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, antara lain yang memuat ketentuan mengenai pelarangan dan sanksi iklan niaga tentang minuman keras, zat adiktif, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama, serta eksploitasi anak di bawah usia 18 tahun.

"Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 telah mengatur pemberlakuan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan minuman keras, zat adiktif, dan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan, namun ketentuan pemberian sanksi itu diubah dan dihilangkan di draft RUU Cipta Kerja" ujar Abdul Kharis, dalam keterangan tertulisnya Rabu (12/08).

"Saya mengingatkan apabila ketentuan sanksi ini dihapus, akan semakin banyak pihak yang mengiklankan produk-produk minuman keras dan zat adiktif di media radio maupun televisi," kritik Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

Kharis merujuk pada ketentuan Pasal 79 draft RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur sanksi pidana pada Pasal 46 ayat (3) terkait dengan aturan pelarangan iklan niaga.

Sebelumnya, larangan tersebut diberlakukan bagi pihak-pihak yang mengiklankan minuman keras dan zat adiktif di media radio dan televisi.

Oleh karena itu, lanjut Kharis, ketentuan mengenai penghapusan sanksi ini bertentangan dengan etika penyiaran karena dapat merusak generasi muda Indonesia.

"Ini jelas dapat mengakibatkan kemunduran bagi dunia penyiaran Indonesia" pungkas Kharis.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pasal 79 draft RUU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58.



Politisi PKS: Awasi Rencana Rekrutmen Komcad, Adil dan Tanpa Diskriminasi

“Kemenhan menargetkan 25.000 generasi milenial bergabung dalam Komcad Pertahanan Negara. Oleh karenanya Saya akan pastikan rekrutmen Komcad harus dilakukan secara adil dan transparan. Berlaku untuk siapapun warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (14/08) — Anggota DPR RI asal Fraksi PKS menanggapi rencana pembukaan pendaftaran Komponen cadangan (Komcad) pertengahan tahun 2020 yang merupakan kewenangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan).

“Komcad bukanlah wajib militer. rencananya mereka yang terseleksi akan dilatih dasar militer selama tiga bulan. Tenaga Komcad ini nantinya bisa dikerahkan atas petunjuk Presiden dengan persetujuan DPR”, jelas Toriq Hidayat.

Anggota Komisi I ini menambahkan Komcad sebagai bagian integral

pertahanan negara merupakan kewenangan pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional dengan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara.

“Menjadi anggota Komcad adalah warga negara yang telah memenuhi persyaratan. Sesuai

dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara,” ungkap Toriq.

Selanjutnya Toriq menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Daerah (Panda) atau Sub Panda, yang dalam hal ini adalah Kodam atau Kodim se-Indonesia. Rencananya, rekrutmen tahap pertama akan menyasar kalangan milenial usia 18-35 tahun.

“Kemenhan menargetkan 25.000 generasi milenial bergabung dalam Komcad Pertahanan Negara. Oleh karenanya Saya akan pastikan rekrutmen Komcad harus dilakukan secara adil dan transparan. Berlaku untuk siapapun warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi,” tutup Toriq.

Toriq Juga berjanji akan mengawasi dan memastikan fungsi Komcad nantinya benar-benar hanya untuk kepentingan NKRI bukan untuk kepentingan politik penguasa.



Sukamta: Pendidikan Bela Negara di Kampus Diperlukan, Tapi Bukan Bersifat Militer

Dalam konteks ini penyelenggaraan program bela negara di lingkungan perguruan tinggi memang diperlukan, tapi bukan berbentuk Pendidikan militer, karena Pendidikan militer itu hanya wajib bagi warga yang lulus seleksi awal komponen cadangan. Untuk mendaftar menjadi komponen cadangan sendiri sifatnya sukarela. Pemaksaan di sini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia," terang Sukamta.

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (18/08) — Diberitakan beberapa media bahwa Kementerian Pertahanan berencana menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program Pendidikan militer dan bela negara dalam kurikulum perguruan tinggi.

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, Selasa (18/8) di Jakarta menyatakan konstitusi kita mengamatkan bahwa Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Negara memfasilitasi warganya yang ingin turut serta dalam usaha

pembelaan negara.

"Bela negara ini bisa berbentuk Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer sebagai calon komponen cadangan, pengabdian sebagai anggota TNI atau pengabdian sesuai profesi," ungkapnya.

Sukamta menambahkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini berbentuk Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dilakukan dalam lingkup dunia Pendidikan, masyarakat dan dunia pekerjaan.

"Dalam konteks ini penyelenggaraan program bela

negara di lingkungan perguruan tinggi memang diperlukan, tapi bukan berbentuk Pendidikan militer, karena Pendidikan militer itu hanya wajib bagi warga yang lulus seleksi awal komponen cadangan. Untuk mendaftar menjadi komponen cadangan sendiri sifatnya sukarela. Pemaksaan di sini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia," terang Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menambahkan bahwa dalam UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal komponen pendukung dan komponen cadangan. Pada pasal 17 disebutkan bahwa komponen pendukung itu bersifat sukarela. Demikian juga pasal 28, diatur bahwa komponen cadangan juga bersifat sukarela. Artinya, tidak ada wajib militer di sini. Bagi perguruan tinggi dipersilakan untuk menyelenggarakan PKBN atau tidak.



"Jika kampus ingin menyelenggarakan, bisa misalnya dengan menghidupkan kembali mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan dengan modifikasi program sedemikian rupa tidak hanya teori tatap muka di kelas, bisa dikombinasi dengan Pendidikan outdoor misalnya, tapi juga bukan berbentuk Pendidikan militer karena bukan dilakukan dalam rangka mencetak para kombatan", urainya.

Doktor lulusan Manchester Inggris ini menjelaskan bahwa ancaman bagi negara sekarang tidak hanya ancaman militer, tapi juga ancaman ekonomi, ideologi, wabah penyakit, siber, dan seterusnya. Program bela

negara tidak selalu dilakukan untuk mencetak para kombatan, tapi juga untuk mencetak generasi bangsa yang tangguh yang siap bela negara dengan bidang keahliannya masing-masing.

"Yang penting di sini tujuan kita adalah menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk hidup berbangsa dan bernegara serta menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan Negara serta kemampuan awal Bela Negara, tandas Sukamta.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Memperingati **HARI KONSTITUSI** 18 Agustus 2020

*Semoga konstitusi tetap kokoh
menuntun bangsa menuju cita-cita
pendiri bangsa, terwujudnya masyarakat
adil makmur dan sejahtera*

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Ketua MKD DPR RI

Peringati Hari Konstitusi

Habib Aboe Ajak semua Elemen Berpegang Teguh pada Konstitusi NKRI

Makna peringatan ini adalah sebagai pengingat kita, bahwa segenap komponen negara harus selalu berpedoman pada konstitusi. Jadi baik DPR, DPD, Presiden, maupun Lembaga negara lainnya wajib bekerja sesuai dengan konstitusi

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (19/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy mengucapkan Selamat Hari Konstitusi, 18 Agustus 2020.

Menurut pria yang juga merupakan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini, Hari Konstitusi tidak bisa terpisahkan dari proses Berbangsa dan Bernegara.

"Saya ucapkan selamat hari konstitusi, ini adalah peringatan penting kita sebagai sebuah negara. Bangsa ini telah memiliki kesadaran bersama menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara," terang pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Memperingati hari konstitusi, lanjutnya, adalah mengingatkan kita soal sebuah penting sebuah dasar negara.

"Konstitusi sangat penting dalam suatu negara, karena konstitusi merupakan pegangan yang menjadi batasan-batasan bagaimana suatu negara dijalankan," tegas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Pada dasarnya, kata Habib Aboe, peran penting konstitusi terhadap sebuah negara ialah sebagai pedoman bagaimana tata kelola negara akan dijalankan.

"Makna peringatan ini adalah sebagai pengingat kita,

bahwa segenap komponen negara harus selalu berpedoman pada konstitusi. Jadi baik DPR, DPD, Presiden, maupun Lembaga negara lainnya wajib bekerja sesuai dengan konstitusi," urainya.

Dalam menjalankan tugasnya, imbuh Habib Aboe, Lembaga negara tidak bisa berjalan semauanya sendiri, melainkan harus sesuai ketentuan yang ada di UUD 1945.

"Melalui peringatan hari konstitusi saya mengajak agar kita semua selalu menjalankan ketatanegaraan kita sesuai dengan UUD 1945 secara murni dan konsekuen," tutup Habib Aboe.



Anggota FPKS Soroti Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam RUU Cipta Kerja

Saya melihat persoalan perizinan berusaha ini lebih kepada pelaksanaannya, bukan di peraturannya. Sehingga bagi saya, rumusan kemudahan perizinan dalam RUU Cipta Kerja menjadi tidak relevan. Sebaiknya Pemerintah fokus memperkuat perizinan berbasis Online System Submission (OSS) ataupun Perizinan Satu Pintu (PTSP),"

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (12/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, kembali menyoroti muatan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Kali ini, legislator asal Sukabumi itu mengingatkan pemerintah terkait sektor perizinan dalam RUU Cipta Kerja yang justru berpotensi menjadi permasalahan baru. Padahal, tujuan disusunya

RUU Cipta Kerja adalah untuk mempermudah paket perizinan yang sebelumnya telah ada.

"Permasalahan perizinan kan dianggap merupakan salah satu momok paling menakutkan bagi kalangan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal itu paling tidak terlihat dari peringkat Ease of Doing Business (EoDB) yang masih di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia,

Thailand dan Vietnam," kata Slamet kepada media, Selasa (11/08/2020).

Betapa tidak, sambung Slamet, Pemerintah menyebut, untuk membuat semacam resort di Indonesia, diperlukan sekitar 22 jenis dokumen perizinan untuk dapat memulai usaha tersebut. Kondisi ini tentu saja tidak menarik bagi investor.

Slamet menuturkan, secara umum pemeringkatan EoDB tersebut memberikan gambaran betapa sulitnya melakukan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga pada tahun 2018 beberapa investor kelas kakap dari Tiongkok yang merelokasi pabriknya, tidak ada satupun yang dipindahkan ke Indonesia.

"Hal inilah yang menjadi latar belakang dirumuskan nya RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah, dimana 70 persen dari pasal-pasal nya berkaitan dengan kemudahan perizinan berusaha. Apabila itu disahkan, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia yang



pada akhirnya akan memberikan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat," jelas Slamet.

Tetapi Slamet mengingatkan, persoalan perizinan berusaha yang selama ini terjadi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh para pemegang kebijakan yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, banyak didapati praktik-praktik pungli bagi setiap jenis perizinan yang akan dikeluarkan.

"Selain itu, sistem perizinan yang masih banyak dilakukan secara manual juga mengakibatkan proses izin usaha membutuhkan waktu yang cukup lama," ucap Slamet.

"Saya melihat persoalan

perizinan berusaha ini lebih kepada pelaksanaannya, bukan di peraturannya. Sehingga bagi saya, rumusan kemudahan perizinan dalam RUU Cipta Kerja menjadi tidak relevan. Sebaiknya Pemerintah fokus memperkuat perizinan berbasis Online System Submission (OSS) ataupun Perizinan Satu Pintu (PTSP)," tegas Slamet.

Slamet membeberkan, beberapa hal yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko dalam rumusan RUU Cipta Kerja, dianggap masih belum memberikan gambaran solusi bagi persoalan perizinan usaha di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Gerakan Setengah
Miliar Masker

Jangan Bebani Rakyat dan Kepala Desa

Surat bernomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020 yang diterbitkan, Pemerintah mewajibkan Kepala Desa melakukan pengadaan masker kain yang bisa dicuci sebanyak 4 buah untuk setiap warganya, yaitu 2 masker diadakan dengan dana desa melalui BUMDes



Fraksi PKS, memandang bahwa kewajiban peng-adaan masker dengan logo HUT Kemerdekaan RI ini sekedar seremoni yang saatnya sekarang sungguh tidak tepat. Lebih penting bagi rakyat Indonesia khususnya warga desa untuk sehat, merdeka dari penularan Covid-19 dan juga merdeka dari kemiskinan sebagai dampak akibat pandemi

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T

Anggota Komisi V DPR RI



Gerakan Setengah Miliar Masker

Aleg PKS: Jangan Bebani Rakyat dan Kepala Desa

Fraksi PKS memandang bahwa kewajiban pengadaan masker dengan logo HUT RI ini sekedar seremoni yang saatnya sekarang sungguh tidak tepat. Lebih penting bagi rakyat Indonesia khususnya warga desa untuk sehat, merdeka dari penularan Covid-19, juga merdeka dari kemiskinan sebagai dampak akibat Covid-19

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Lombok (13/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengkritisi program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menerbitkan surat tentang Gerakan Setengah Miliar Masker untuk Desa Aman Covid-19, (04/08/2020) lalu.

Menurut pria yang akrab disapa SJP ini, Surat bernomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020 yang diterbitkan Pemerintah mewajibkan Kepala Desa melakukan pengadaan masker

kain yang bisa dicuci sebanyak 4 buah untuk setiap warganya, yaitu 2 masker diadakan dengan dana desa melalui BUMDes, sedangkan 2 masker lainnya melalui swadaya warga yang mampu (gotong royong). Masker tersebut juga harus berlogo ulang tahun ke-75 RI.

"Dalam penjelasan Kemendes PDTT di luar surat tersebut, mekanisme pengadaan masker harus oleh BUMDes dengan menggunakan dana desa, baik berupa penyertaan modal maupun program Desa Tanggap Covid-

19 yang membeli dari BUMDes," ungkap SJP.

Hal ini, kata SJP, sebenarnya sudah sesuai dengan Perendes PDPT No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perendes PDPT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, yaitu bahwa dana desa dapat digunakan untuk penyertaan modal BUMDes dan juga penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19 yang merupakan program dari Desa Tanggap Covid-19.

"Program tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendes PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa," tukas Suryadi.

Akan tetapi, lanjutnya, Fraksi PKS melihat ada beberapa potensi masalah dibalik Gerakan Setengah Miliar Masker di atas, yaitu : Pertama, Kesulitan dalam mengubah APBDes.

"Mengingat pengadaan masker berlogo tersebut membutuhkan perubahan APBDes,



Kemendes PDTT seolah menggampangkan dengan menginstruksikan kepala desa untuk memperbaiki Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), unposting kegiatan lain menjadi pengadaan masker atau pemberian modal kepada BUMDes untuk membuat masker. Padahal perubahan APBDes ini menjadi masalah-masalah sebagai berikut," beber SJP.

Pertama, katanya, masalah kewajiban untuk seluruh desa di Indonesia. Menurut SE No. 8 Tahun 2020 di atas, APBDes untuk kebutuhan

tanggap Covid-19 tersebut diubah untuk desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19.

"Kriteria KLB ini menurut SE ini, diatur dalam Peraturan Bupati dan Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan diwajibkannya pengadaan masker berlogo tersebut kepada seluruh desa di Indonesia, tentu saja menyalahi SE yang dibuat Mendes PDTT sendiri," terangnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing Ambruk,

Aleg PKS: Kok Setiap Tahun Begini?

Ungkap bagaimana prosedur dijalankan, seharusnya dalam waktu singkat akan segera diketahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Berikan sanksi jika hasil investigasi terbukti kesalahan ada pada Penyedia Jasa.

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (18/08) — Ambruknya konstruksi jalan tol terjadi lagi. Kali ini, proyek konstruksi pembangunan Seksi IV Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Kelurahan Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Ahad, (16/08/2020).

Peristiwa ini mendapat tanggapan Anggota F-PKS DPR RI Ahmad Syaikh. Dia merasa heran karena sejak tahun 2017, selalu saja terjadi kecelakaan proyek jalan tol.

"Saya dan kita patut heran. Mengapa selalu terjadi ambruknya proyek jalan tol. Sejak tahun 2017 ada saja kejadian. Kok setiap tahun begini?" ungkap Syaikh.

Dalam catatan Syaikh, sejak bulan Oktober 2017 hingga 2019 proyek jalan tol di beberapa tempat mengalami kecelakaan konstruksi. Di antaranya Tol Pemalang-Batang, Tol Pasuruan-Probolinggo, Tol Becakayu, Tol Desari yang mengalami dua kali ambruk dan Tol BORR. Sebagian besar dari kecelakaan proyek tol tersebut dikerjakan oleh PT.Waskita Karya.

Dari daftar kecelakaan yang tercatat ini saja, sudah terjadi 7 kecelakaan besar dalam kurun waktu 3 tahun. Artinya sejak 2017, dapat dikatakan setiap tahun

Pemerintah belum pernah mencatatkan clean sheet terhadap kecelakaan konstruksi jalan tol. Belum lagi jika dihitung kecelakaan akibat konstruksi proyek-proyek Pemerintah lainnya, seperti meledaknya pipa Pertamina akibat proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.

"Ini harus segera dilakukan evaluasi. Bentuk tim investigasi," tegas Syaikh.

Diketahui kontraktor proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing adalah PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Kecelakaan terjadi pada saat melakukan pekerjaan pengecoran. Beberapa pekerja yang mengalami luka ringan sudah dibawa ke RS Citra Harapan Indah, Bekasi untuk mendapatkan perawatan.

Syaikh meminta kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek-proyek konstruksi besar, agar memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan (K3). Syaikh juga mendorong kepada Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan.

"Standar K3 harus betul-



betul diterapkan. Pengawasan oleh pemerintah juga perlu ditingkatkan," kata Syaikh.

Syaikh mendesak agar Pemerintah segera menginvestigasi peristiwa kecelakaan ini secara cepat dan transparan.

"Ungkap bagaimana prosedur dijalankan, seharusnya dalam waktu singkat akan segera diketahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut," ujar

Syaikh.

Selain itu, Anggota Komisi V DPR RI juga meminta agar Pemerintah memberikan sanksi kepada Penyedia Jasa jika terbukti bersalah. Payung hukumnya Pasal 52 dan Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

"Berikan sanksi jika hasil investigasi terbukti kesalahan ada pada Penyedia Jasa," tegas Syaikh.



Semakin merata kemakmuran yang terjadi pada tiap-tiap penduduk Indonesia, Maka Indonesia menunjukkan kebangkitannya. Namun selama Kekayaan negeri ini dinikmati segelintir manusia saja, maka keterpurukan akan selalu membayangi negeri ini menuju jurang kehancuran

Hj. Nevi Zuairina
Anggota Komisi VI DPR RI

**Ekonomi Indonesia
Masih Rapuh**

Nevi: Akibat Ketimpangan Kemiskinan tak dapat Dikendalikan

Ekonomi Indonesia Masih Rapuh

Nevi: Akibat Ketimpangan Kemiskinan tak dapat Dikendalikan

Semakin merata kemakmuran yang terjadi pada tiap-tiap penduduk Indonesia, Maka Indonesia menunjukkan kebangkitannya. Namun selama Kekayaan negeri ini dinikmati segelintir manusia saja, maka keterpurukan akan selalu membayangi negeri ini menuju jurang kehancuran

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (19/08) — Pengelolaan Anggaran yang menjadi otoritas pemerintah mesti ada perubahan signifikan bila negara ini mau berubah menjadi lebih baik.

Pengelolaan APBN 2021 harus dipikul dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan memperhatikan kekuatan moral yang tinggi sehingga menekan sebesar-besarnya ketidak efisienan dan ketidak efektifan anggaran negara yang tidak ada hasilnya.

Hal ini dikatakan Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina memperhatikan Rancangan Undang-Undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019.

"Ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia masih besar. Angka kemiskinan di perdesaan mencapai 12,6 persen dan di perkotaan 6,56 persen. Perlu ada trobosan yang seolah menggembak negara ini menjadi bangun dan bertindak. Kita harus segera bangkit,

berdiri dan melakukan sesuatu yang menjauhkan negara ini masuk dalam badai marabahaya sistemik", kata Nevi.

Politisi PKS ini menjelaskan, bahwa marabahaya sistemik yang dimaksud adalah, stagnasi kondisi Indonesia yang belum beranjak dari negara berkembang menjadi negara maju, meskipun sudah 75 tahun Indonesia terbebas dari penjajahan.

"Pertumbuhan ekonomi minim, Lapangan kerja tidak efektif, pengangguran naik menjadi 7,05 Juta orang pada tahun 2019, rendahnya realisasi Pendapatan Negara yang hanya sebesar 90,6 persen dari target dan masih banyak lagi persoalan yang menjadi benang kusut dari pusat hingga daerah", terangnya.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengkhawatirkan perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia. Pada 2019, total investasi hanya tumbuh 12 persen saja.



Penyerapan tenaga kerja mencapai 1,03 juta orang sepanjang 2019. Bahkan kondisi keuangan negara ini semakin memburuk di masa-masa yang akan datang dengan adanya hutang yang dilakukan Pemerintah. Karena Hutang yang sudah dilakukan, belum digunakan sesuai dengan peruntukannya secara efektif dan efisien.

"Masih marak kita mendengar berita di negara ini, memfasilitasi Tenaga Kerja Asing (TKA), namun disisi lain, anak bangsa masih belum kebagian slot pekerjaan. Harus ada upaya pemerintah, meminimalisir tumbuhnya rakyat miskin di Indonesia.

Bahkan kalo memungkinkan, harus ditekan hingga berkurang dari masa ke masa", tutur Nevi.

Nevi mengatakan, kondisi Pandemi COVID-19 ini telah merubah struktur masyarakat hingga sampai titik status sosialnya. Masyarakat yang tadinya berada pada posisi menengah atas, kini telah berubah menjadi menengah bawah. Artinya fenomena terjadinya pelonjokan angka kemiskinan dapat dipastikan telah terjadi. Namun angkanya belum kelihatan sampai ada sensus yang akurat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota DPR Soroti Pengembangan Kawasan Industri dalam RUU Cipta Kerja

“Pengaturan kawasan industri juga harus mencantumkan kewajiban adanya hubungan kawasan industri dengan potensi domestik yang ada disekitar kawasan tersebut atau yang dikenal dengan istilah Domestic Linkage. Ini penting untuk memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan kepada daerah sekitar

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi VI DPR RI

Dumai (13/08) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Chairul Anwar, menyoroti aturan mengenai pengembangan tentang kawasan industri dalam RUU Cipta Kerja yang terkesan hanya membahas tentang industri besar saja tapi tidak ada dampak terhadap Industri Kecil Menengah.

“Kami melihat dalam draft RUU Cipta Kerja di Bab IX mengenai kawasan ekonomi dimana pada Bab ini memuat kerangka pengaturan bagi pengembangan kawasan strategis di Indonesia. Di dalam pengaturan tersebut terkesan hanya sekedar normatif dan

tidak memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap ekonomi masyarakat,” ungkap Chairul disela kunjunganannya di Kota Dumai (Rabu, 12/08/2020).

Menurut Chairul dalam pengembangan Kawasan Industri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan serta diatur dalam RUU Cipta Kerja diantaranya harus memperhatikan penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja domestik Indonesia dan lokal di daerah kawasan industri tersebut.

“Dalam aturan kawasan industri harus jelas dan tegas dicantumkan bahwa pengembangan kawasan industri harus

mengutamakan menyerap tenaga kerja dari dalam negeri yang berada disekitar kawasan Industri tersebut. Jangan sampai munculnya kawasan Industri di suatu daerah tapi tenaga kerjanya mengimpor tenaga kerja dari luar negeri, ini kan tidak berdampak apa-apa terhadap ekonomi daerah sekitar,” ungkap Politisi PKS asal Riau ini.

Selain pencantuman aturan tentang ketenagakerjaan, yang perlu juga diatur dalam pengembangan kawasan industri adalah adanya hubungan kawasan industri dengan potensi domestik yang ada disekitar kawasan industri tersebut.

“Pengaturan kawasan industri juga harus mencantumkan kewajiban adanya hubungan kawasan industri dengan potensi domestik yang ada disekitar kawasan tersebut atau yang dikenal dengan istilah Domestic Linkage. Ini penting untuk memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan kepada daerah sekitar,” tegas Chairul.

Selanjutnya menurut Chairul hal yang perlu diatur juga adalah adanya link and



match antara industri besar yang ada di Kawasan Ekonomi dengan Industri Kecil dan Menengah di daerah sekitar Kawasan Ekonomi.

“Link and match antara industri besar yang ada di kawasan ekonomi dengan Industri kecil menengah di sekitarnya harus diatur dan mulai diterapkan. Dibeberapa negara industri menerapkan hal tersebut, dimana komponen

bahan baku industri besar disupport oleh industri kecil dan menengah yang ada disekitarnya, kita harus mencontoh Korea Selatan dan beberapa negara yang menerapkan sistem tersebut. Jika hal tersebut diterapkan maka akan terjadi dampak ekonomi yang besar dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya di kalangan elit saja,” tutup Chairul

Hadapi Resesi

Anggota Fraksi PKS Minta Pemerintah Bersikap Realistis

“Sebaiknya Pemerintah tidak memberikan optimisme berlebihan kepada rakyat dengan proyeksi-proyeksi ekonomi yang sulit direalisasikan. Lebih baik mengajak seluruh komponen masyarakat bersiap menghadapi resesi, dan membantu Pemerintah menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

AMIN AK,M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

rta (13/08) — Triwulan III tahun 2020 tinggal enam pekan tersisa. Sulit untuk membalikkan kontraksi ekonomi menjadi pertumbuhan positif, baik dilihat dari indikator ekonomi maupun kesehatan.

Minimnya terobosan dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi penyebab utamanya. Sikap paling realistis adalah menahan laju resesi agar ekonomi Indonesia tidak terpersok terlalu dalam.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS,

Amin Ak menanggapi lambannya realisasi program pemulihan ekonomi nasional saat ini. Hingga tersisa enam pekan triwulan III, dana stimulus pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun baru terserap 20%.

“Sebaiknya Pemerintah tidak memberikan optimisme berlebihan kepada rakyat dengan proyeksi-proyeksi ekonomi yang sulit direalisasikan. Lebih baik mengajak seluruh komponen masyarakat bersiap menghadapi resesi, dan membantu Pemerintah menyelesaikan

masalah pandemi Covid-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tegas Amin.

Menurut politisi yang mewakili Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu, Pemerintah sebaiknya mencontoh China dan Vietnam yang ekonominya sudah pulih karena memprioritaskan pengendalian pandemi.

“Bagaimana rakyat mau optimis ekonomi akan membaik jika kurva jumlah kasus Covid-19 masih terus naik, tak kunjung melandai,” lanjutnya.

“Pelonggaran PSBB di tengah tren jumlah kasus harian dan kematian terus meningkat risikonya malah kian menyebabkan lambatnya pemulihan ekonomi. Resesi bisa berlangsung singkat jika masalah utamanya, penularan pandemi, bisa dikendalikan,” ujar Amin.

Menurut Amin, jangan paksakan diri menghindari resesi pada triwulan III 2020, sehingga mengabaikan pondasi kuat bagi ekonomi dalam jangka panjang. Lebih baik fokus agar pada triwulan IV-2020 ekonomi mulai rebound,



sehingga pada tahun 2021 perekonomian bisa tumbuh positif dan ekspansi, sehingga dalam jangka panjang kita lebih siap menghindari resesi.

Lebih lanjut Amin mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan sektor yang terbukti tumbuh pada triwulan II 2020 seperti sektor pertanian serta fokus pada percepatan belanja pemerintah untuk memutar roda ekonomi di sektor riil.

“Sejumlah sektor seperti sektor komunikasi, makanan minuman, perdagangan online, dan obat-obatan punya harapan besar untuk tumbuh lebih besar”, tandasnya.

Pemerintah, lanjut Amin, harus mampu memtransmisikan program stimulus ekonomi di

pedesaan dengan penyelamatan sektor yang bergerak, khususnya pangan. Sektor pangan selain memenuhi kebutuhan akhir (final demand) bagi rumah tangga juga harus didorong menjadi input bagi sektor lainnya dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang makanan olahan.

“Modal kerja untuk UMKM harus benar-benar sampai dan bisa menggerakkan usaha mereka agar daya beli masyarakat kembali terkerek naik karena 90% tenaga kerja ada di sektor UMKM. Maksimalkan penyerapan dana stimulus sebesar Rp695,2 triliun,” ujar Amin mengakhiri.

Soal Smelter

Wakil Ketua Fraksi PKS: Pemerintah Harus Berwibawa Tegakkan UU Minerba

Yang paling memahami untung-rugi suatu kebijakan bagi Negara, ya Negara itu sendiri, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah. Bukan badan usaha. Kalau badan usaha, pengetahuannya terbatas pada untung-rugi bagi perusahaannya sendiri,

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (19/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah tidak mengubah target pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Menurut Mulyanto, kali ini Pemerintah harus tegas dengan target waktu yang sudah disepakati. Jangan memberi tenggang waktu tambahan lagi karena sebelumnya PTFI sudah dua kali gagal memenuhi target yang ditentukan.

"Pemerintah harus berani menolak permintaan PTFI untuk

memperpanjang target pembangunan smelter di Gresik. Smelter itu diperlukan untuk memberi nilai tambah pendapatan negara dari setiap bahan tambang yang dihasilkan," ungkapnya.

Mulyanto menegaskan, selama jadwal pembangunan smelter itu mundur maka selama itu pula nilai tambah tambang dari usaha tambang tidak diperoleh.

Terkait pembangunan smelter untuk pengolahan hasil tambang, lanjutnya, Pemerintah jangan sampai diiditke badan usaha untuk melanggar UU No.

3/2020 tentang Minerba, yang usia diundangkannya belum sampai seumur jagung.

"Ini akan menjadi presiden buruk bagi tata hukum kehidupan bernegara", imbuhnya.

Apalagi, kata Mulyanto, kalau percaya pada pernyataan segelintir badan usaha, bahwa pembangunan smelter tersebut tidak menguntungkan bagi Negara.

"Pemerintah harus berwibawa menegakkan ketentuan UU Minerba. Jangan mau didikte kepentingan pengusaha," tandasnya.

Saat ini, imbuh Mulyanto, persoalannya sudah bukan lagi terbatas masalah pelayanan terhadap badan usaha tapi sudah terkait kewibawaan hukum negara.

"Negara akan dianggap lemah jika terus-menerus mengikuti maunya pihak badan usaha. Apalagi sampai melanggar UU. Tentu keadaan itu akan menjadi presiden buruk, yang memalukan," imbuh mantan Inspektoral Jenderal Departemen Pertanian era SBY.

"Yang paling memahami



untung-rugi suatu kebijakan bagi Negara, ya Negara itu sendiri, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah. Bukan badan usaha. Kalau badan usaha, pengetahuannya terbatas pada untung-rugi bagi perusahaannya sendiri," ujar Mulyanto.

Sebelumnya PTFI mengajukan perpanjangan

target pembangunan smelter selama setahun, dari Desember 2023 menjadi Desember 2024. Yang berarti melanggar batas dalam UU No.3/2020 tentang Minerba.

PTFI berdalih target tersebut sulit dicapai karena saat ini sedang terjadi pandemi Covid sehingga proses pembangunan menjadi terkendala.

Bahas Geospasial Lewat Webinar

Uluputty Gandeng Badan Informasi Geospasial

Kami berharap bisa menunjang menjadi informasi yang terhimpun dan sebagaimana juga tadi ada beberapa hal yang menjadi satu catatan yaitu bagaimana potensi-potensi sumber daya alam ini kemudian bisa ditunjang dengan potensi sumber daya manusia yang baik agar bisa menunjang kesejahteraan bagi provinsi Maluku

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Ambon (13/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menggelar webinar sosialisasi informasi geospasial Rabu (12/08/2020) yang di berlangsung secara online dan offline.

Webinar yang diikuti 140 peserta secara virtual dan 20 peserta offline ini mengangkat tema 'Pemetaan tata ruang dan atlas guna menunjang pembangunan provinsi Maluku'.

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara diantaranya Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin dan Saadiah Uluputty

sebagai Keynote Speech serta Muhammad Amin Lasaiha, Akademisi Universitas Pattimura dan Ryan Abadi, Perwakilan Badan Informasi Geospasial RI sebagai narasumber.

Menurut Uluputty sejauh ini tata ruang kota dan beberapa wilayah di Provinsi Maluku masih jauh dari kondisi terintegrasi, baik dari sisi integrasi sektoral maupun integral.

"Perencanaan tata ruang merupakan suatu kebijakan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pemanfaatan ruang kota dan juga beberapa ruang-ruang antar wilayah dan

problematisa penataan ruang beberapa dekade akhir di provinsi Maluku menunjukkan bahwa produk perencanaan kota khususnya di provinsi Maluku dan juga beberapa kabupaten yang ada di provinsi Maluku dari kondisi yang terintegrasi baik dari sisi integrasi secara sektoral maupun integral ini membutuhkan kordinasi antara kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku", ulasnya.

Sementara itu, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang tata ruang. Misalnya UU no 26 tahun 2007 dan UU no 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial dimana dalam beberapa pasalnya ada kewenangan untuk menyusun informasi geospasial tematik, bahwa wajib mengacu kepada informasi geospasial dasar dan informasi geospasial yang tematik.

"Pemerintah pada tahun 2019 menargetkan sejumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia harus memiliki peta rencana detail tata ruang (RDTR) dan peta digitalnya tujuannya untuk mempercepat proses transparansi perizinan serta integritas melalui online



single submission dimana dalam perkembangan IT kita berharap bahwa provinsi Maluku juga menjadi satu provinsi yg juga tidak ketinggalan selalu terupdate data RT/RWnya terutama data RDTRnya," kata Uluputty.

Uluputty melanjutkan berdasarkan informasi-informasi dan diskusi-diskusi yang digelar dalam bentuk webinar ini menjadi beberapa masukan serta catatan yang pihaknya dapatkan.

"Kami berharap bisa menunjang menjadi informasi yang terhimpun dan sebagaimana juga tadi ada beberapa hal yang menjadi satu catatan yaitu bagaimana potensi-potensi sumber daya alam ini kemudian bisa ditunjang dengan potensi sumber daya

manusia yang baik agar bisa menunjang kesejahteraan bagi provinsi Maluku," harapnya.

Sementara itu menurut Hasanuddin Zainal Abidin, Ketua Badan Informasi Geospasial RI, belum terpenuhinya data dasar dan peta dasar disebabkan beberapa permasalahan. Daerah masih belum paham tentang aspek pemetaan singkah dalam membuat standar KAK, penggunaan tenaga ahli dan penganggaran ini belum sesuai.

"Persoalannya karena banyak Pemda yang tidak menyadari penyusunan pembuatan peta rencana tata ruang perlu peta dasar yang up to date, detail dan akurat dan itu membutuhkan SDM yang baik," kata Hasanuddin.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Wacana Sertifikasi Da'i dinilai Diskriminatif

"Katanya Menteri Agama bukan hanya untuk agama Islam saja, tapi kenapa ini (red:kebijakan sertifikasi) hanya menyasar umat Islam? Ini jelas diskriminatif"

KH. Bukhori, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



Wacana Sertifikasi Dai Oleh Pemerintah

Bukhori: Menag Jangan Gegabah!

“Menag harus hati-hati di masa seperti ini. Kebijakan tersebut (red:sertifikasi dai) sangat kontraproduktif dalam situasi seperti ini. Bahkan, sangat berpotensi menimbulkan pembelahan di tubuh umat Islam itu sendiri”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Menteri Agama untuk tidak gegabah memunculkan polemik baru di masa pandemi.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul wacana Menteri Agama untuk menggulirkan program sertifikasi dai/ penceramah dalam waktu dekat.

“Menag harus hati-hati di masa seperti ini. Kebijakan tersebut (red:sertifikasi dai) sangat kontraproduktif dalam situasi seperti ini. Bahkan, sangat berpotensi menimbulkan pembelahan di tubuh umat Islam itu sendiri” ungkap Bukhori di Jakarta, Minggu (16/08).

Lebih lanjut, politisi PKS ini mempertanyakan alasan kebijakan tersebut hanya

diberlakukan bagi umat Islam semata. Sebab, Kementerian Agama pernah mengklaim bahwa Menteri Agama tidak hanya mengurus persoalan agama Islam saja, tetapi juga persoalan agama lain yang resmi diakui oleh negara.

“Katanya Menteri Agama bukan hanya untuk agama Islam saja, tapi kenapa ini (red:kebijakan sertifikasi) hanya menysar umat Islam? Ini jelas diskriminatif” tegasnya.

Kepada Menteri Agama, Anggota Badan Legislatif (Baleg) ini memperingatkan bahwa cara menyikapi kelompok agama yang kritis terhadap kekuasaan tidak bisa dilakukan secara serampangan dengan menecap mereka sebagai kelompok radikal dan teroris. Ia menegaskan, cara berpikir tersebut adalah tindakan yang

sangat naif.

“Politik labelling ini sangat berbahaya bagi kerukunan umat beragama dan kehidupan berbangsa. Apalagi, setiap warga negara, apapun identitas agamanya, dijamin haknya oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kritik yang disampaikan kepada kekuasaan, termasuk oleh kelompok agama sekalipun, tidak boleh dibungkam dengan cara seperti itu. Naif sekali” pungkasnya

Bukhori juga berpesan supaya Menteri Agama sebaiknya menjadi pemimpin yang mengayomi umat dan bangsanya, bukan justru bertindak sebaliknya.

Sebagai informasi, pada akhir 2019 silam Menteri Agama sempat menggulirkan wacana program sertifikasi dai atau penceramah. Program tersebut disusun dalam rangka menangkal gerakan radikalisme. Berdasarkan kabar terbaru, program sertifikasi dai rencananya akan diterapkan pada tahun 2020 setelah melalui pembahasan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin



Kemenag Akan Kucurkan Bantuan Untuk Pesantren

HNW: Harus Adil dan Amanah

“Bantuan Rp 2,5 Triliun untuk Pesantren harus dilakukan secara benar, adil dan amanah, sekaligus karenanya perhatikan juga lembaga pendidikan agama non-islam agar tidak menimbulkan permasalahan”

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta, (13/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, meminta Kementerian Agama agar segera realisasikan bantuan untuk Pesantren dan berlaku adil dan amanah dalam pendistribusiannya senilai Rp 2,599 Triliun.

HNE juga meminta Kemenag menyalurkan bantuan serpu-pu untuk Lembaga Pendidikan Agama non-Islam secara proporsional.

“Bantuan Rp 2,5 Triliun untuk Pesantren harus dilakukan secara benar, adil dan amanah, sekaligus karenanya perhatikan juga lembaga pendidikan agama non-islam agar tidak menimbulkan permasalahan”, demikian disampaikan HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta (13/08).

Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR RI menyebutkan, program bantuan untuk lembaga Pendidikan Agama seperti Pesantren ini sudah lama diusulkan oleh HNW dan Anggota-komisi VIII DPR RI, bahkan sejak raker Komisi VIII dengan Kemenag bulan April 2020.

Pihaknya menyoroti kinerja Pemerintah yang membutuhkan waktu hingga 4 bulan dari sejak awal program diusulkan hingga SK Dirjen Pendidikan Islam terbit.

“Padahal, sudah sejak lama, banyak Pesantren dan Lembaga Pendidikan keagamaan menyampaikan bermacam usulan dan keluhan akibat terdampak Covid-19”, tegasnya.

HNW sapaan akrabnya menilai, Pemerintah seharusnya

mampu bergerak cepat mendistribusikan bantuan untuk pihak terdampak Covid-19, dalam hal ini Pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

Apalagi sejak Mei 2020 Pemerintah sudah dipersenjatai dengan UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 menjadi UU, yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian/realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19.

“Seharusnya program ini sudah direalisasikan bulan Juni/Julai sebelum masa pembelajaran sebagian besar Pesantren kembali dimulai. Oleh karena itu, mekanisme pencairan dana jangan sampai dipersulit agar tidak semakin memperlambat realisasi dan serapan anggaran, tapi juga perlu dibekali dengan juknis yang benar agar bantuan itu tepat sasaran dan menjadi solusi atasi pandemi covid-19” tegas HNW.

Sebagaimana diberitakan, Kemenag telah menyeleksi 21.173 Pesantren yang akan menerima bantuan operasional. Hingga saat ini realisasi program tersebut sedang menunggu penerbitan SK Dirjen Pendidikan, yang kabarnya akan terbit pada pekan ini.



Sekolah Jadi Kluster Baru Covid-19

Netty: Stop Pembelajaran Tatap Muka

Hentikan pembelajaran tatap muka hingga keadaan benar-benar aman berdasarkan evaluasi komprehensif. Pemerintah jangan bereksperimen dalam penanganan Covid-19. Taruhannya sangat mahal

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (16/08) — Diizinkannya belajar tatap muka bagi sekolah di zona hijau menjadikan lembaga pendidikan sebagai kluster baru.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani Aher meminta Pemerintah menarik kebijakan tersebut.

"Hentikan pembelajaran tatap muka hingga keadaan benar-benar aman berdasarkan evaluasi komprehensif.

Pemerintah jangan bereksperimen dalam penanganan Covid-19. Taruhannya sangat mahal," katanya dalam keterangan media, Sabtu (15/08/2020).

Netty menyarankan agar

Pemerintah mengambil pelajaran dari Vietnam, Selandia Baru dan Korsel yang kembali menutup sekolah setelah kurva Covid-19 makin meningkat.

"Bukan hanya pusat perbelanjaan dan area publik, sekolah dan pesantren harus menjadi perhatian utama dalam proses pencegahan dan transmisi virus," ungkapnya.

Terkait tantangan memenuhi kompetensi siswa dalam pendidikan jarak jauh, politisi PKS ini menawarkan solusi.

"Pemerintah perlu menetapkan kurikulum darurat yang mengakomodir keragaman kondisi sarana prasarana

pendidikan jarak jauh di setiap wilayah. Perlu juga dipikirkan adanya stimulus berupa peringkat pendidikan jarak jauh bagi daerah dan masyarakat yang membutuhkan, serta stimulus program pendampingan belajar siswa berbasis masyarakat," paparnya.

Netty berharap pemerintah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan proses pendidikan selama pandemi.

"Bagus kan jika menjadi gerakan bersama masyarakat. Ini tanggung jawab negara dan seluruh elemen bangsa untuk masa depan generasi kita," tandasnya.



SERTIFIKASI PEKERJA MUSIK

Harus Bersifat Sukarela untuk Perlindungan

Seharusnya dalam konteks seni musik tradisional kita yang menetapkan standarnya. Orang asing yang harus mengikuti. Tetapi pengaturan sertifikasi ini seharusnya sifatnya voluntary untuk perlindungan. Bukan mewajibkan semua pekerja seni musik harus memiliki sertifikasi

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DPR Minta Sertifikasi Pekerja Musik Harus Bersifat Sukarela untuk Perlindungan

Seharusnya dalam konteks seni musik tradisional kita yang menetapkan standarnya. Orang asing yang harus mengikuti. Tetapi pengaturan sertifikasi ini seharusnya sifatnya voluntary untuk perlindungan. Bukan mewajibkan semua pekerja seni musik harus memiliki sertifikasi

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Bandung (16/08) — Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta sertifikasi pekerja musik harus bersifat sukarela bukan menjadi suatu kewajiban dimiliki.

Ia lebih sekuat penerbitan sertifikasi tersebut lebih kepada perlindungan musisi dan pendukung pertunjukan musik dalam pertunjukan internasional.

Pasalnya, sebut Ledia, selama ini baik musisi maupun penata sound engineer, tata lampu (lighting) dibayarnya rata-rata 1/3 dari honor yang

didapat musisi internasional bersertifikat.

Seharusnya dalam konteks seni musik tradisional kita yang menetapkan standarnya. Orang asing yang harus mengikuti.

"Tetapi pengaturan sertifikasi ini seharusnya sifatnya voluntary untuk perlindungan. Bukan mewajibkan semua pekerja seni musik harus memiliki sertifikasi," kata Ledia saat dihubungi, Minggu (16/8/2020).

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKPS) di DPR ini juga mempertanyakan apakah kompetensi kerja seni

musik ini sudah dibincang juga dengan Baparekraf yang menaungi seniman serta Dirjen Kebudayaan yang menaungi seniman tradisional.

Menurutnya ini perlu ada penjelasan apa yang disertifikasi.

"Yang perlu disertifikasi lebih awal terutama yang berkaitan dengan kerja-kerja seni panggung selain seni musik. Bukan hanya sertifikasi untuk musisi pemegang alat musik, tetapi juga penata sound engineer, penata sound effect, penata lighting dan lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut dia juga meminta sertifikasinya harus bertujuan agar pemegangnya bisa diakui dan berkompetisi dengan pelaku seni asing. Begitu juga, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Musiknya juga harus diakui oleh pekerja seni yang bersangkutan. Sebab, musik adalah 1 dari 16 sektor ekonomi kreatif.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menambahkan berdasarkan Standar Kompe-



tensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Seni Musik dan skema sertifikasi, LSP yang akan mengeluarkan sertifikasinya.

Hanya yang menjadi pertanyaan ini sudah didiskusikan sama Baparekraf belum karena rangenya kompetensi seni musik sangat luas.

Menurut Ledia, semestinya dijelaskan road mapnya seperti keterampilan apa yang akan disertifikasi terlebih dahulu, dengan alasan apa, bagaimana pentahapannya dan sebagainya.

Selanjutnya LSP juga harus dibuka lebih dari satu sehingga tidak ada bottle neck dan di kenali oleh para seniman musiknya sebagai LSP yang benar patut.

Dan yang lebih penting lagi harus ada penjelasan kepada

para seniman musik tersebut apa yang dimaksud dengan sertifikasi, mengapa diperlukan dan konsekuensinya.

Tidak ketinggalan harus disampaikan bahwa bukan berarti yang tidak bersertifikasi tidak boleh berkreasikan maupun tampil dalam pertunjukan.

"Ini konteksnya harus mengarah pada perlindungan terhadap musisi kita dalam konteks pertunjukan internasional," tegas legislator asal Jawa Barat ini.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meluncurkan SKKNI di Bidang Seni Musik dan skema sertifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Imbas Iklan Amoral di Situs Guru BP

Kemendikbud Diminta Tertibkan Situs Penyedia Pendidikan Daring

“Apakah Kemendikbud kurang sosialisasi, padahal banyak situs yang dikelola di bawah kemendikbud khusus untuk pembelajaran daring, atau jangan-jangan kalah populer di banding situs swasta

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (14/08) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menertibkan situs-situs penyedia layanan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau berbasis daring agar lebih aman bagi peserta didik yang mengaksesnya.

“Kasus iklan yang berisi konten pornografi atau apapun bentuknya mestinya ada filter dan jadi tanggung jawab regulator, karena situs tersebut diakses oleh peserta didik,” kata Fikri di Jakarta, Jumat (14/08).

Fikri mengakui, iklan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi situs-situs swasta. Namun, hal itu ibarat pedang bermata dua, karena iklan atau adware dapat bermuatan negatif, seperti pornografi, judi, atau kekerasan bagi yang mengaksesnya.

“Khusus bagi situs penyedia konten Pendidikan sekolah mestinya lebih hati-hati dalam memuat iklan karena diakses oleh siswa,” ujarnya.

Karenanya, Fikri meminta Kemendikbud RI untuk bekerjasama dengan Kemenkominfo

RI dalam menertibkan situs-situs sejenis, terutama agar menerapkan filtering dalam setiap kontennya.

“Konten Pendidikan harus mengutamakan prinsip moral yang berahlaqul karimah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan Pancasila,” imbuhnya.

Lebih jauh Fikri mempertanyakan situs-situs penyedia layanan serupa (PJJ) yang sebenarnya telah disediakan oleh Kemendikbud selama ini.

“Apakah Kemendikbud kurang sosialisasi, padahal banyak situs yang dikelola di bawah kemendikbud khusus untuk pembelajaran daring, atau jangan-jangan kalah populer di banding situs swasta,” tanya dia.

Fikri mendesak evaluasi di Kemendikbud untuk mengukur sejauh mana situs-situs di bawah pengelolaan intensi pemerintah tersebut benar-benar efektif menjadi sarana



pembelajaran jarak jauh.

“Apakah mudah diakses, tidak lemot bila banyak yang mengaksesnya, kontennya cukup variatif, dan solutif bagi peserta didik,” ucap dia.

Sebelumnya, melalui surat edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, Kemendikbud telah memberikan 23 situs rekomendasi, khusus untuk pembelajaran jarak jauh.

“Hanya saja evaluasinya bagaimana, yakni sosialisasi mengenai PJJ ini dilakukan,” kritik Fikri.

23 situs tersebut berisi materi pembelajaran mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi yang bisa diakses baik oleh siswa/ mahasiswa, maupun guru/ dosen.

Protes publik belakangan muncul ketika salah satu blog penyedia konten Pendidikan memuat iklan yang bermuatan pornografi diketahui oleh salah satu orang tua siswa kelas 2 SD.

Siswa tersebut kemudian merekam tayangan iklan di situs tersebut dan menyebarkannya melalui media sosial sehingga menjadi viral di masyarakat.

Catatan Legislator PKS terkait Dana Stimulus 2 Juta Rupiah untuk Ibu Rumah Tangga

Pemerintah perlu benar-benar memperhatikan penerima stimulus bukan hanya sekelompok tertentu saja. Dan program-program stimulus tersebut dapat menyelamatkan atau setidaknya membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dari sisi peningkatan daya beli masyarakat, menciptakan usaha mikro baru, dan meningkatkan UMKM yang sudah ada

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (14/08) — Pemerintah merencanakan memberi bantuan berupa pinjaman tanpa bunga yang ditujukan kepada ibu rumah tangga sebesar Rp 2 juta per orang dan diharapkan dapat digunakan untuk modal usaha.

Hal ini dijelaskan oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir yang

mengatakan program ini masih sedang tahap pembahasan.

Iskandar mengatakan, pinjaman tanpa bunga ini juga ditujukan bagi masyarakat yang turut terkena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Covid-19 dan ingin memulai usaha baru.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan

rencana yang digulirkan tersebut sebaiknya mempertimbangkan banyak hal.

Menyampaikan pandangannya di Jakarta (13/08/2020), Anis mengatakan skema stimulus ini harus jelas. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi calon penerima stimulus tersebut (terkait data calon penerima).

"Dimana kebijakan ini berupa kredit lunak yang ditujukan untuk pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin berusaha dan ibu rumah tangga yang melakukan usaha mikro," terang Anis.

Anis juga mempertanyakan outstanding dari kredit tanpa bunga tersebut. Menurut Anis pemerintah harus menjelaskan berapa jumlah dana yang akan digelontorkan terkait dua stimulus ini.

"Kemudian, pemerintah juga harus merencanakan dengan baik prosedur penyalurannya," imbuhnya.

Selanjutnya, Anis menekankan perlunya kontrol dan



evaluasi yang baik dalam setiap mata anggaran yang dikeluarkan Pemerintah secara berkala.

"Pemerintah harus memastikan bahwa pemberian kedua stimulus ini tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya (baik itu sebagai modal kerja ataupun BLT)," ujarnya.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai bahwa kedua stimulus tersebut adalah program yang menarik sekaligus akan memunculkan banyak polemik/kecemburuan karena jumlah penerima stimulus ini pasti terbatas.

Sementara di masyarakat, orang yang sesuai kriteria jumlahnya sangat banyak.

"Pemerintah perlu benar-benar memperhatikan penerima stimulus bukan hanya sekelompok tertentu saja. Dan program-program stimulus tersebut dapat menyelamatkan atau setidaknya membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dari sisi peningkatan daya beli masyarakat, menciptakan usaha mikro baru, dan meningkatkan UMKM yang sudah ada," pungkasnya.

Negara Terancam Resesi

Ecky: Belanja APBN 2021 Harus Efektif dan Optimal

dalam kondisi resesi, kebijakan fiskal harus ekspansif, akan tetapi kebijakan belanja Pemerintah masih jauh dari harapan. Pada tahun 2019, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 53 triliun, meningkat tajam dibandingkan 2018 yang sebesar Rp 36 triliun

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (14/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menilai, rancangan RUU APBN Tahun 2021 yang dibacakan oleh Presiden Jokowi perlu dipertajam, tidak hanya terkait disiplin fiskal, tetapi arah kebijakan belanja pemerintah.

"Pada RAPBN 2021, angka defisit dipatok mencapai 5,5%, angka ini sangat tinggi sehingga Pemerintah perlu melakukan disiplin anggaran yang baik, jangan sampai anggaran dibelanjakan secara sia-sia, belanja APBN 2021 harus efektif dan optimal", paparnya

menanggapi pidato Nota Keuangan RAPBN 2021 oleh Presiden.

Ecky menambahkan dalam kondisi resesi, kebijakan fiskal harus ekspansif, akan tetapi kebijakan belanja Pemerintah masih jauh dari harapan. Pada tahun 2019, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 53 triliun, meningkat tajam dibandingkan 2018 yang sebesar Rp 36 triliun.

Menurut Ecky tingginya SiLPA menunjukkan inefektifitas kerja dari Pemerintah, yang akhirnya menciptakan hilangnya peluang pembangunan

ekonomi.

"Dalam kondisi resesi seperti sekarang, ekspansi perlu dilakukan secara optimal. Pemerintah perlu lebih serius dalam mengelola kebijakan belanjanya," tandas Ecky. Ecky belum melihat bahwa kebijakan belanja pada RAPBN 2021 yang telah disampaikan dapat membantu Indonesia keluar dari jurang resesi.

Resesi ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran akibat wabah Covid-19, ada persoalan demand side yang besar di sini, seharusnya RAPBN 2020 menyelesaikan permasalahan daya beli ini. Belanja-belanja seperti bantuan sosial dan subsidi yang erat dengan daya beli masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan, justru belanja berupa fasilitas perpajakan untuk dunia usaha yang meningkat tajam", tambahnya.

Menurut Ecky, resesi tidak akan selesai apabila Pemerintah hanya mendorong sisi penawaran, tetapi perlu juga menjaga sisi permintaan.

"Oleh sebab itu bantuan-bantuan sosial perlu ditingkat-



kan dan dimasifkan pada APBN 2021", ungkap Anggota DPR asal Jawa Barat ini.

Ecky juga menyoroti kebijakan insentif fiskal yang justru banyak diumbar untuk sektor swasta skala besar. Kebijakan tersebut diyakini tidak terlalu efektif mendorong investasi.

Menurut Ecky selama empat tahun terakhir, belanja untuk insentif pajak untuk

dunia usaha sudah mencapai Rp 450 triliun.

"Akan tetapi realisasi investasi pada industri yang mendapat fasilitas perpajakan seperti logam dasar dan pertambangan hanya mencapai 15 persen dari total realisasi investasi, kalah jauh dari sektor jasa (total 57,5 persen) yang justru minim mendapatkan fasilitas insentif perpajakan", pungkasnya

PKS LEGISLATIVE CORNER

MEMBAHAS ISU DARI
SUDUT YANG PAS



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO

Live Interactive

Bersama Anggota
Legislatif PKS



SAKSIKAN SETIAP JUM'AT
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB

Pembawa Acara

RUU Cipta Kerja Pangkas Peran MUI

Persoalan halal-haram merupakan persoalan mendasar dalam ajaran Islam dan soal keyakinan agama bagi kaum Muslimin Indonesia. Karena itu pengaturan masalah ini harus cermat dan hati-hati,"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (13/08) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dikebut mengingat sekarang masih masa reses DPR.

Menurut Mulyanto, isi RUU Omnibus Law ini sangat sensitif dan berpengaruh luas kepada masyarakat. Sehingga harus dibahas secara tatap muka langsung, tidak melalui sarana online seperti sekarang ini.

"Salah satu hal sensitif yang perlu dibahas secara cermat dalam RUU setebal lebih dari seribu halaman ini adalah soal pengurangan peran MUI dalam proses penetapan fatwa halal", ungkap Mulyanto.

Isu strategis seperti ini, dinilai Mulyanto, perlu dibicarakan secara mendalam dengan melibatkan pihak-pihak

terkait agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Persoalan halal-haram merupakan persoalan mendasar dalam ajaran Islam dan soal keyakinan agama bagi kaum Muslimin Indonesia.

Karena itu pengaturan masalah ini harus cermat dan hati-hati," tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan dalam RUU Cipta Kerja ini sedikitnya ada dua isu penting terkait jaminan produk halal yang perlu dicermati masyarakat.

"Isu tentang siapa yang berwenang menetapkan fatwa halal serta pemberian fatwa halal bagi produk usaha mikro dan kecil berdasarkan 'pernyataan' sepihak", tegasnya.

Pasal 49 ayat (4) RUU Omnibus Law Ciptaker

mengubah pasal 10 ayat (2) UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang semula penetapan kehalalan produk oleh MUI menjadi: penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Sedangkan dalam pasal 49 ayat (2), RUU Ciptaker menyisipkan pasal-pasal baru, yaitu (4A), yang berbunyi: (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.

Bedasarkan beleid ini, lanjut Mulyanto, maka Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) didasarkan pada fatwa tertulis dari MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum. Jadi MUI tidak lagi menjadi otoritas hukum tunggal dalam soal fatwa halal ini.

Banyaknya otoritas pemberi fatwa halal ini mungkin positif dalam memberi kemudahan pengurusan sertifikat halal, namun beresiko adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu yang tidak memiliki



otoritas mumpuni dalam urusan agama," tandas Mulyanto.

Bila terjadi hal seperti itu, katanya, akan menimbulkan keraguan, kebingungan, ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara jaminan produk halal. Ketentuan ini harus kita timbang dengan cermat.

Sementara itu, lanjut Mulyanto, ketentuan halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil, yang cukup didasarkan pada 'pernyataan' sepihak, sangat rawan penyimpangan.

"Pertanyaannya apakah sebuah pernyataan subjektif secara sepihak dari pengusaha kecil dan mikro tersebut dapat memberikan 'jaminan' kepada

masyarakat bahwa produk itu benar-benar halal," imbuh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden SBY ini.

Kondisi ini, lanjutnya, cukup potensial menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan konsumen Muslim, yang akhirnya dapat menurunkan permintaan kepada usaha kecil dan mikro tersebut.

"Sebaiknya, perizinan pernyataan halal untuk usaha kecil dan mikro dikeluarkan dari rezim perizinan berusaha," saran Mulyanto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

RUU Omnibus Law Membuat Pendidikan Jadi Liberal dan Mahal

Pendidikan adalah masalah vital bangsa ini. Berkaitan langsung dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta masa depan kita

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (12/08) - Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai ketentuan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat berbahaya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya banyak aturan penting dalam penyelenggaraan pendidikan akan dihapus dan diubah dengan ketentuan baru dalam RUU ini.

Sayangnya, kata Mulyanto, ketentuan baru dalam RUU Cipta Kerja ini cenderung menjadikan pendidikan sebagai komoditas bisnis dan menanggalkan aspek kebudayaan dalam pendidikan.

"RUU yang mengamandemen hampir 100 UU namun menghasilkan 500 peraturan

baru ini, memuat 3 ketentuan penting yang akan mengubah wajah dunia pendidikan yakni dicabutnya sifat nirlaba pada kelembagaan pendidikan; dihapusnya pembatasan bagi lembaga pendidikan asing dan hilangnya pilar kebudayaan dalam pendidikan tinggi," papar Mulyanto.

Soal badan hukum pendidikan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi, lanjutnya, yang semula berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Pasal 60 ayat (2) UU No. 12/2012

tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), diubah melalui pasal 68 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (6) RUU Omnibus Law Cipta Kerja, menjadi dapat berprinsip nirlaba dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

"Terkait penyelenggaraan pendidikan asing, Pasal 68 ayat (6) dan Pasal 69 ayat (8) RUU Cipta Kerja telah menghapus beberapa ketentuan yang ada pada Pasal 65 ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 90 ayat (4) serta ayat (5) UU No. 12/2012 tentang Dikti, yang semula: wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan nasional; mengutamakan dosen, pengelola dan tenaga kependidikan WNI; serta wajib mendukung kepentingan nasional, menjadi: tanpa adanya kewajiban-kewajiban tersebut," terangnya.

Sedangkan terkait kebudayaan. Pasal 69 ayat (1) RUU Ciptaker menghilangkan frasa 'berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia' dalam ketentuan umum poin (2) UU No. 12/2012 tentang Dikti yang



berbunyi: 'Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia', menjadi: 'Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi'.

Wakil Ketua Fraksi PKS

DPR RI ini menilai, bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat mendorong komersialisasi pendidikan dengan semangat liberal-kapitalistik, yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi dan barang dagang komersil industri jasa, yang langgar bagi lembaga pendidikan asing serta abai terhadap pengembangan aspek kebudayaan nasional.

PKS menilai Pemerintah terkesan memaksakan pembahasan pasal-pasal terkait dengan pendidikan dalam RUU setelah lebih dari 1.000 halaman ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

P K S
PARTAI KEADILAN
DEWAN PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi 5,5% di 2021

Anggota Banggar FPKS: Pemerintah Jangan Terus Bermimpi

Dalam situasi normal saja selama periode 2014-2019, pertumbuhan ekonomi 5,5% tidak pernah tercapai, apalagi dalam kondisi diambang resesi dan pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya. Sebaiknya pemerintah realistis dan jangan terus bermimpi

Ir. H. Sigit Sosiantomo
Anggota Badan Anggaran DPR RI

Pertumbuhan Ekonomi 5,5% di 2021

Anggota Banggar: Pemerintah Jangan Terus Bermimpi

Dalam situasi normal saja selama periode 2014-2019, pertumbuhan ekonomi 5,5% tidak pernah tercapai, apalagi dalam kondisi diambang resesi dan pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya. Sebaiknya pemerintah realistis dan jangan terus bermimpi

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Surabaya (18/08) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menilai, target pertumbuhan ekonomi 5,5% yang dipatok pemerintah dalam RAPBN 2021 dinilai tidak realistis.

Sigit meyakini angka tersebut tak akan bisa dicapai, apalagi saat ini Indonesia diambang resesi dan masih menghadapi kondisi pandemi yang belum juga usai.

"Dalam situasi normal saja selama periode 2014-2019, pertumbuhan ekonomi 5,5% tidak pernah tercapai, apalagi dalam kondisi diambang resesi dan pandemi yang tidak jelas

kapan berakhirnya. Sebaiknya pemerintah realistis dan jangan terus bermimpi." Kata Sigit, anggota Banggar dari FPKS DPR RI.

Menurut Sigit, pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,5% akan sulit tercapai mengingat pertumbuhan ekonomi dikuatirkan kedua (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% atau minus 5,32%. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tahun 2020 diprediksi masih minus 1,1%.

Selain itu, berkaca pada periode 2014–2019 dan kondisi normal, pencapaian pertumbuhan ekonomi selama

periode tersebut tidak pernah mencapai 5,5%. Pertumbuhan ekonomi RI kala itu rata-rata mentok diangka 5% pertahun.

"Fraksi PKS mencatat, dalam situasi normal pada 2014–2019 pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun hanya 5 persen. Padahal gaungnya pemerintah kala itu mentargetkan 7%. Dan selama pandemi ini, pertumbuhan ekonomi terus jeblok, bahkan minus 5,32% di Q2 dan diprediksi masih minus sampai akhir tahun. Lalu, bagaimana bisa lompat ke 5,5% di 2021? Apalagi pemerintah hanya mengandalkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi kita diambang resesi," kata Sigit yang juga menjabat sebagai Kawilda Jatijaya DPP PKS.

Menurut Sigit, Fraksinya mencatat kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada 2019



mencapai 56,62%; meningkat dari 55,76% pada 2018.

"Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli. Peranan belanja pemerintah hanya 8,75%. Angka ini sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah," katanya.

Sementara itu, menurut

angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun.

Angka tersebut mencapai 14,58% dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun. Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6%.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tanggapan PKS

terkait Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR

Pidato Presiden R-APBN 2021 Sangat Optimis

Ketua Fraksi PKS: Buktikan!

Jangan sampai Presiden dan Pemerintah termakan janjinya sendiri. Target pertumbuhan dipatok sangat optimis tapi percepatan serapan anggaran dan stimulus pemulihan ekonomi lambat. Artinya, pemerintah harus membuktikan dengan kerja keras dan kerja cepat yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Rakyat butuh bukti nyata

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (14/2) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi Pidato Presiden yang optimis melihat ekonomi 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 - 5,5 persen.

"Mudah-mudahan optimisme itu didukung oleh realitas kinerja pemerintah khususnya tim ekonomi dalam menumbuhkan ekonomi negara dan ekonomi masyarakat," ungkap Jazuli.

Ketua Fraksi PKS melihat target ini sangat optimis di

tengah kondisi dan basis dasar pencapaian pertumbuhan di tahun 2020 yang hanya berkisar - 1% sampai 0,2% yang artinya tekanan sangat dalam bahkan di ambang resesi.

Anggota Komisi I DPR ini berharap Pemerintah punya strategi jitu untuk mengejar target pertumbuhan tersebut. Butuh kebijakan ekstra untuk mengakselerasinya. Untuk itu, Jazuli mengingatkan pentingnya kerja keras Pemerintah dengan target pertumbuhan yang disampaikan. Apalagi serapan anggaran 2020 sebagaimana kritik Presiden belum lama

kepada para menternya sangat lambat, belanja pemulihan ekonomi secara keseluruhan baru 22 persen, stimulus untuk UMKM baru 26,4 persen.

"Jangan sampai Presiden dan Pemerintah termakan janjinya sendiri. Target pertumbuhan dipatok sangat optimis tapi percepatan serapan anggaran dan stimulus pemulihan ekonomi lambat. Artinya, pemerintah harus membuktikan dengan kerja keras dan kerja cepat yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Rakyat butuh bukti nyata," pungkas Jazuli.



Rencana Defisit RAPBN 2021 Rp 971,2 T atau 5,5% PDB

Ecky: Melebihi Kesepakatan Dengan DPR

Defisit anggaran ini merupakan selisih antara belanja negara dengan pendapatan negara. Selama ini defisit ini dipenuhi oleh pemerintah melalui pembiayaan dan atau utang”

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (14/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menilai, defisit anggaran pada RAPBN 2021 disampaikan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari produk domestik bruto (PDB) diatas angka kesepakatan dengan DPR.

“Rentang angka defisit APBN tahun 2021 telah dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR. Dalam pembahasan lalu telah disepakati terkait rentang defisit anggaran 3,21-4,17 persen terhadap PDB, rasio utang di kisaran 37,64-38,5 persen terhadap PDB. Angkanya sudah diusulkan oleh Pemerintah dan dibahas bersama DPR. Tetapi nyatanya angkanya dinaikan sepihak oleh Pemerintah lebih besar. Pelebaran Defisit terkait dengan utang, yang akan menjadi beban generasi kedepan. Kita

ingin ini dibahas kembali urgensi dan arahnya lebih mendalam”, tegasnya menanggapi pidato Nota Keuangan RAPBN Tahun 2021 oleh Presiden.

Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp 1.039,2 triliun.

Angka defisit yang mencapai Rp 971,2 triliun ini, lanjut Ecky, berasal dari penetapan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.747, 5 triliun atau lebih besar dari pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp 1.776,4 triliun.

“Defisit anggaran ini merupakan selisih antara belanja negara dengan

pendapatan negara. Selama ini defisit ini dipenuhi oleh pemerintah melalui pembiayaan dan atau utang”, ungkapnya.

“Secara umum kita akan mempertajam pembahasannya untuk menagih komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Kita mempertanyakan pelebaran yang besar ini untuk apa. Karena ini berdampak serius karena defisit meningkat, utang makin melonjak, sehingga rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio kita bisa mencapai kisaran 40 persen. Ini makin berat”, imbuhnya.

Ecky kembali mengingatkan bahwa dalam Rapat Paripurna DPR terakhir, Pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka asumsi makro untuk RAPBN 2021. Dalam pembahasan telah disepakati terkait rentang defisit anggaran 3,21-4,17% terhadap PDB, rasio utang di kisaran 37,64-38,5% terhadap PDB, dan keseimbangan primer 1,24-2,07% terhadap PDB.

Selain itu disepakati pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5%, laju inflasi 2-4%, nilai tukar rupiah Rp 13.700-Rp 14.900 per dolar Amerika



Serikat, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,29-8,29%, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US\$ 42-US\$ 45 per barel. Selain itu, lifting minyak bumi sebesar 690 ribu-710 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 990 ribu-1,01 juta barel setara minyak per hari.

“Utang yang besar akan membebani APBN kita dalam jangka panjang. Beban bunganya akan sangat berat. tahun ini saja, beban bunga utang yang ditanggung APBN diproyeksikan mencapai Rp338,8 triliun. Dengan angka

ini, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara sudah mencapai 20 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2019, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara masih sebesar 14,07. Tahun 2015, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara masih rendah di level 10,43 persen. Pendapatan negara akan tersedot untuk bayar beban bunga utang. Ini beban sangat berat”, pungkasnya.



Anggota FPKS: Pidato Presiden Jangan Hanya Sekedar *Lips Service*

“Pemerintah tidak peka terhadap kondisi industri dalam negeri. Di tengah melemahnya kinerja industri dalam negeri akibat adanya pandemi COVID-19, pemerintah masih saja melakukan impor Alat Pelindung Diri (APD) dalam jumlah yang besar

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (14/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, merespon pidato Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR hari Jum'at, (14/08).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita harus bangga terhadap produk Indonesia, kita harus membeli produk dalam negeri.

Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus memanfaatkan krisis yang terjadi di dunia saat ini sebagai momentum untuk melakukan lompatan.

Menanggapi Pidato Presiden Jokowi tersebut

anggota Fraksi PKS, Amin Ak memandang bahwa kebijakan Pemerintah yang ada selama ini tidak sejalan dengan isi Pidato Presiden Jokowi. Hal itu dibuktikan dengan nilai impor yang cenderung terus naik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor Indonesia pada Juni 2020 mencapai US\$ 10,76 miliar atau naik 27,56% dibandingkan dengan Mei 2020.

Amin berharap Pidato Presiden Jokowi bukan hanya sekedar *lips service* saja. Presiden Jokowi selaku kepala negara harus dapat

memastikan jajaran di bawahnya benar-benar merealisasikan isi pidatonya.

“Pemerintah tidak peka terhadap kondisi industri dalam negeri. Di tengah melemahnya kinerja industri dalam negeri akibat adanya pandemi COVID-19, pemerintah masih saja melakukan impor Alat Pelindung Diri (APD) dalam jumlah yang besar,” kata Amin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama Januari-Mei 2020 tercatat impor APD sebanyak 2.993,34 ton atau US\$ 43,48 juta, dimana mayoritas APD impor yang masuk berasal dari China sebanyak 2.006,18 ton.

Padahal industri dalam negeri saat ini sedang giat-giatnya memproduksi APD untuk menanggulangi penyebaran wabah COVID-19.

“Secara tidak langsung hal itu mematikan industri dalam negeri di tengah pandemi COVID-19 yang pada akhirnya menyebabkan perekonomian nasional bukannya meroket tapi malah merosot,” tegas Amin.



Lebih menyedihkan lagi, lanjut Amin, impor barang konsumsi juga meningkat sepanjang Pak Jokowi jadi Presiden. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor barang konsumsi pada Juni 2020 tercatat sebesar US\$ 1,41 miliar.

Jumlah tersebut meningkat hingga 51,10% dari bulan Mei 2020. Bila dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2019, jumlah tersebut juga meningkat

37,15% yoy.

Makanan dan minuman untuk rumah tangga dan makanan minuman (consumer goods) semi durable impornya masih tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun sejak era Pak Jokowi.

“Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah membangun industri dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah produk Nasional,” pungkasnya.



Tanggapi Pidato Presiden,

Johan minta pemerintah Bangun Kemandirian Pangan

Saya berharap pemerintah memiliki kebijakan konkret untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, misalnya dengan memberikan penguasaan lahan minimal 0,5 hektar kepada rumah tangga petani dan kebijakan penetapan harga dasar komoditas yang dihasilkan petani agar petani mendapat keuntungan yang lebih baik

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (15/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, memberikan tanggapan terhadap pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato penyampaian nota Keuangan untuk APBN 2021, Jumat, (14/08) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Johan, hal yang perlu disoroti terutama berkaitan dengan persoalan ketahanan pangan, dimana Pemerintah berencana

mengembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

"Isi pidato Presiden belum mencerminkan paradigma ketahanan pangan berbasis pemberdayaan petani dan kemandirian nasional, tapi lebih kepada rencana proyek pangan dengan cara mendaur ulang pembangunan pangan di bekas lahan proyek cetak sawah sejauh hektare yang pernah gagal di zaman orde baru," sebut Johan.

Politisi PKS ini melihat pidato tersebut ingin menyam-

paikan kepada public bahwa Pemerintah menjamin kelancaran rantai pasokan makanan ke seluruh wilayah negeri.

Namun, lanjut Johan, perlu disadari bahwa persoalan distribusi pangan sering muncul akibat dari lemahnya kinerja pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stock pangan terutama di daerah rawan pangan serta tata niaga pangan yang tidak berpihak kepada petani.

"Pada prinsipnya, saya setuju dengan pengembangan pangan yang bersifat integrated system dari hulu sampai hilir menjadi produk pangan industri," ungkap Johan.

Namun sayangnya, kata Johan, seringkali Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang dapat meningkatkan bargaining position para petani dengan pelaku usaha dan stakeholders industry pangan lainnya.

"Hal ini penting supaya pemerintah memberikan perlindungan kepada petani agar mendapat keuntungan yang layak demi kesejahteraan petani," urai Johan.



Anggota Legislatif dari dapil NTB 1 ini juga menang-gapi pidato nota Keuangan yang menyebutkan bahwa untuk ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp 104,2 Triliun, yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan.

Atas hal tersebut menurut Johan, jangan sampai pemerin-tah salah sasaran dengan menggenjot proyek pangan pada Kawasan yang tidak memiliki kesesuaian lahan dan kurang produktif seperti di lahan gambut.

"Namun sebaiknya pemerintah mengoptimalkan pengembangan Kawasan

Produksi Pangan yang telah terbukti mampu meningkatkan nilai produksi pangan dalam negeri, misalnya terus meng-genjot pengembangan Kawasan bawang putih nasional agar ke depan kita tidak tergantung impor lagi," papar Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga memberi catatan agar pembangunan sarana prasarana dan penggunaan teknologi dilaksanakan dengan prinsip tepat guna dan sesuai dengan karakteristik kegiatan on farm yang dilakukan petani.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kritisi Pidato Presiden

Aleg PKS: Indonesia Hari Ini Butuh Aksi Nyata

presiden juga mengutarakan kita harus bangga dengan produk Indonesia dan beli produk dalam negeri, tapi kenyataannya pemerintah dalam RUU Cipta Kerja yang diberikan ke DPR malah menghapuskan kalimat "memprioritaskan produksi dalam negeri" dengan tujuan membebaskan impor produk pangan dari luar negeri.

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (15/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet mengkritisi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/08).

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada kuartal kedua tahun 2020 ini.

Jokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami plus 2,97 persen pada kuartal pertama tahun 2020. Kemudian angka

tersebut turun drastis menjadi minus 5,32 persen pada kuartal kedua tahun 2020.

"Indonesia hari ini butuh kerja dan aksi nyata bagaimana pemulihan ekonomi bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Slamet kepada awak media.

Masih dalam pidato yang sama, Jokowi mengungkapkan ekonomi negara-negara maju mengalami minus hingga belasan persen.

Jokowi menuturkan, kemunduran banyak negara-negara besar tersebut bisa

menjadi peluang dan momentum bagi Indonesia untuk mengejar keteringgalan.

"Presiden jangan cuma bisa berpidato tapi faktanya berbeda. Misalnya berulangkali menyebut dalam rangka ketahanan pangan kita harus menjamin kelancaran pasokan pangan dari hulu ke hilir," tegas Slamet.

Selain itu, sambung Slamet, presiden juga mengutarakan kita harus bangga dengan produk Indonesia dan beli produk dalam negeri, tapi kenyataannya pemerintah dalam RUU Cipta Kerja yang diberikan ke DPR malah menghapuskan kalimat "memprioritaskan produksi dalam negeri" dengan tujuan membebaskan impor produk pangan dari luar negeri.

Slamet menjelaskan, Presiden juga mengatakan perlunya penguatan hukum dengan tidak membiarkan orang melakukan sesuatu yang merugikan bangsa, tapi dalam RUU omnibuslaw cipta kerja aturan sanksi buat importir pangan yang mengimpor padahal produksi dalam negeri



cukup dihilangkan.

"Presiden mengatakan 'kita harus saling mengingatkan. Jangan ada yg merasa benar sendiri' tapi mahasiswa dan masyarakat melakukan demo dihabat dan disalahkan. Bahkan mahasiswa menggelar mimbar akademik dipermasalahkan," tambahnya.

"Secara retorika, semangat itu bagus. Tapi Pak Presiden juga harus bisa menerjemahkan semangatnya tersebut dalam aksi-aksi nyata bagaimana

masyarakat bisa bangkit menghadapi Pandemi Covid-19 ini," tegas Slamet.

"Misalnya dalam sektor pertanian, nyatanya masih banyak petani kita yang mengalami kerugian ketika pasca-panen harga jual produk mereka anjlok. Inilah momentum negara harus hadir bagaimana memberikan kepastian ekonomi di tengah situasi krisis seperti sekarang," pungkas Slamet.

Komentari Pidato Tahunan Jokowi

Mardani: Rakyat Butuh Aksi Nyata Cepat Tanggap!

“Pidato beliau (Presiden Jokowi) bagus. Tapi hanya sekedar pengantar mimpi karena minim aksi nyata dan cepat tanggap yang inovatif terlebih dalam kondisi resesi ekonomi

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (14/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2020.

Mardani mengatakan Pidatonya baik tapi belum ada aksi nyata yang cepat tanggap untuk melakukan perubahan besar pada pemerintahannya.

“Pidato beliau (Presiden Jokowi) bagus. Tapi hanya sekedar pengantar mimpi karena minim aksi nyata dan cepat tanggap yang inovatif terlebih dalam kondisi resesi ekonomi,” kata Mardani, di Komplek Senayan, Jumat (14/08).

Politisi PKS itu minta Presiden untuk segera pimpin

langsung aksi nyata itu dan jangan cuma sekedar pura-pura marah aja.

“Pak Presiden harus tunjukkan aksi nyata yang inovatif. Lakukan focusing anggaran. Berani potong yang belum urgen juga Alokasikan pada sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan,” ujar Mardani.

Ia juga minta melakukan perampangan kabinet dan kabinet agar koordinasi efektif dan efisien.

“Segera Tutup lembaga yang bisa dimerger. Harus berani mulai, jangan cuma berani yang kecil dan receh saja. Salah satu pelajaran berharga dari Pandemi ini, Kementerian/lembaga banyak yang overlap serta tumpang

tindih kerjanya, banyak sebenarnya yang bisa didelegasikan cukup fokus di satu kementerian/lembaga saja. Presiden harus ambil kebijakan tidak populer dan berani!” kata Mardani.

Pelajaran lain dari Pandemi ini, kinerja para pembantu Presiden (Menteri/ketua lembaga) lebih buruk dari periode sebelumnya,

“Segera lakukan Reshuffel kabinet! Tiap hari dalam keraguan harus dibayar oleh nyawa dan kerugian ekonomi masyarakat kecil,” ujar Mardani.

Selanjutnya, Anggota DPR asal Dapil Jakarta I itu mengatakan Indonesia, baru akan bisa melompak bila bisa memanfaatkan krisis ini menjadi batu lompatan.

“Istilahnya, merubah krisis menjadi keberkahan dan kebaikan buat bangsa Indonesia. Namun, semua itu bisa berbalik apabila tanpa aksi nyata! Maka ayo Presiden segera ambil momentum ini untuk melompat lebih jauh menjadi Indonesia yang maju dan berkah,” pungkasnya.



Pidato Presiden Soal Penanggulangan Covid-19

Mufida: Harus Segera Direalisasikan

Jangan jadikan pertimbangan kesehatan pada prioritas kesekian setelah prioritas lainnya. Melalui Pandemi ini kita belajar bahwa kebijakan kesehatan ternyata bisa berpengaruh besar terhadap semua sektor dalam kehidupan kita baik dalam keseharian, ekonomi dan dalam kebijakan lainnya

Dr. HJ. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (15/08) — Presiden Joko Widodo menyampaikan sudah melakukan upaya luar biasa untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian.

Hal ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Umum MPR, DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/08/2020).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menilai pidato Presiden Jokowi adalah sebuah janji dan harapan bagi rakyat Indonesia

dalam penanggulangan Covid 19 yang lebih baik ke depan.

"Pemerintah Pusat tak bisa lagi menganggap enteng potensi penularan Covid-19 dengan beberapa kebijakan atau pernyataan yang saling kontraproduktif atau overlap," ungkapnya.

Mufida menyebut adanya pernyataan New Normal yang multitafsir di masyarakat, telah mengakibatkan melemahnya disiplin protokol kesehatan dalam banyak aktivitas sehari-hari. Sehingga banyak ditemukan klaster baru sumber penularan Covid 19, akhir-akhir ini.

Mufida menyebut, optimis

me yang disampaikan Presiden harus diikuti dengan langkah kongkrit yang eksponensial atau lompatan signifikan dalam menekan angka positif dan kematian akibat Pandemi covid 19. Pemerintah tak boleh lagi gagap dan harus lebih fokus menyiapkan skenario baru mengatasi perluasan pandemi Covid-19 sebagai wujud tanggung negara melindungi kesehatan rakyat Indonesia, sebagaimana amanah Undang Undang.

"Kita sudah punya instrumen penanggulangan Pandemi ini dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Artinya negara ini sudah menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan munculnya wabah kesehatan. Tinggal implementasinya di lapangan perlu ditingkatkan," papar Mufida dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (15/08).

Mufida menyebut sederet persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Seperti banyaknya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berguguran, protokol kesehatan yang masih lemah



implementasinya di masyarakat dan banyak tempat keramaian, banyak temuan klaster penularan baru yang menyebabkan angka meningkat pesat dan sejumlah gedung ditutup sementara. Terakhir tentang vaksin yang masih terus menjadi perbincangan dan persoalan lainnya

"Dalam pidatonya Presiden meminta reformasi fundamental di bidang kesehatan dipercepat. Kami berharap ini bukan hanya sekedar pernyataan janji atau retorika semata. Penanganan Covid-19 menjadi

pilot project pertama sebagai bukti reformasi tersebut," ungkap Mufida penuh harap

Mufida menekankan bawah keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan momentum Pandemi sebagai lompatan besar tetap menggunakan kacamata kesehatan sebagai pertimbangan utama harus menjadi landasan dalam kerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sambut Indonesia Merdeka

Implementasi Pidato Presiden Harus Menyentuh Kebutuhan Masyarakat

importasi negara kita masih sangat tinggi dari tahun ke tahun. Memastikan seluruh jajaran pemerintah untuk membuktikan kemampuannya dalam menekan importasi akan berdampak sangat besar pada keseluruhan aktivitas ekonomi kerakyatan.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (15/08) — Setelah penyampaian pidato Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR, Jum'at, (14/08/2020), Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina berharap, agar Pemerintah seluruh jajaran mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk memastikan implementasi pidato tersebut pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Kebutuhan dasar masyarakat ini selain sandang, pangan dan papan, mesti

meningkat kualitasnya pada sisi pemenuhan Pendidikan, Kesehatan, dan Rasa Aman ketika menjalani kehidupan termasuk dalam mendapat pekerjaan, beribadah dan menjalankan aktivitas usaha ekonomi", tutur Nevi.

Politisi PKS ini menyoroti kalimat pidato presiden yang menyerukan kebanggaan terhadap produk lokal dalam negeri.

"Ini seharusnya

berimplikasi serius terhadap semua instrumen pemerintahan untuk memformulasi aktivitas

bernegara bersama rakyatnya untuk mewujudkan sistem ekonomi dalam negeri yang kokoh", terangnya.

Nevi melanjutkan, bahwa importasi negara kita masih sangat tinggi dari tahun ke tahun. Memastikan seluruh jajaran pemerintah untuk membuktikan kemampuannya dalam menekan importasi akan berdampak sangat besar pada keseluruhan aktivitas ekonomi kerakyatan.

"Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus kembali menggalakkan beli produk dalam negeri dalam ikhtiar menyelamatkan UMKM. Tingginya importasi produk pangan rumah tangga yang terus meningkat harus menjadi perhatian. Membangun industri dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah produk Nasional akan sangat berarti bagi UMKM kita", urai Nevi.

Selain Importasi yang selama ini mengganggu aktivitas dasar pulau ekonomi UMKM,



Nevi juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki dan menata ulang manajemen penyaluran segala bentuk bantuan untuk masyarakat di seluruh Indonesia, baik berupa bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji.

Nevi berpendapat, sudah puluhan tahun subsidi bantuan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung berjalan, tapi hingga hari ini, 75 tahun Indonesia Merdeka, masih tidak ada perubahan signifikan terhadap kemakmuran rakyat bangsa ini.

"75 Tahun Indonesia Merdeka, tapi negara kita belum beranjak menjadi negara maju. Semua kriteria yang ada di negeri ini masih pada kategori negara berkembang. Pemikiran

ini mesti ditanamkan semua pihak terutama pemerintah agar lebih serius untuk memerdekakan bangsa kita dari garis kemiskinan dan ketergantungan dari bangsa-bangsa lain akan pangan, energi instrumen kesehatan", kritis Nevi.

Kebutuhan dasar yang tidak kalah penting dan mesti menjadi perhatian pemerintah adalah masalah rasa aman ketika menjalankan kehidupan kita. Mewujudkan rasa aman ini mesti diawali dengan penegakan hukum yang kuat dan sesuai porsinya. Tidak memandang rakyat biasa atau pejabat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pembangunan Super Koridor Ekonomi Pantura

Aleg PKS: Harus Didukung Kebijakan Fundamental

harus diakui bahwa keberpihakan presiden maupun pemerintah terhadap pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas mental dan kompetensi SDM, terutama didaerah pesisir pantura, saat ini belum terasa. Apalagi dimasa-masa sulit menghadapi efek pandemi Covid

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI

Majalengka (15/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, mengapresiasi keinginan Presiden terkait rencana program percepatan Pembangunan Super Koridor Ekonomi Pantura. Dimana, Majalengka dan Subang menjadi prioritas sasaran program tersebut.

Nurhasan Zaidi menegaskan, cita-cita Presiden ini harus didukung karena akan mengundung investasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM serta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dalam rilisnya, Sabtu (15/8/2020), Nurhasan menyatakan harapan Presiden agaknya kurang realistis bila tidak didukung oleh kebijakan yang fundamental, fokus dan terarah. Terutama membangun mental dan kualitas SDM serta membina iklim ekonomi masyarakat berbasis UMKM yang kondusif.

"Karena, harus diakui bahwa keberpihakan presiden maupun pemerintah terhadap pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas mental dan kompetensi SDM, terutama didaerah pesisir pantura, saat

ini belum terasa. Apalagi dimasa-masa sulit menghadapi efek pandemi Covid," kilah Politisi Fraksi PKS ini.

Kalaupun Presiden ingin melakukan lompatan besar bersama UMKM, Nurhasan menyarankan ada baiknya bangkitkan dulu sektor UMKM agar dapat berdiri tegak dan siap melompat. Termasuk memulihkan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi.

Bagi masyarakat Subang dan Majalengka, lanjut Nurhasan, ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang, namun bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman.

"Ancaman bahwa jangan-jangan masyarakat di sini nantinya hanya menjadi penonton di negeri sendiri di tengah geliatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dari program itu," tuturnya.

Nurhasan meminta Presiden dan jajarannya harus menerjemahkan secara detail, jangan ada gagap dan gagal pemahaman yg menyebabkan kegaduhan serta kekacauan di lapangan. Mengingat masalah



komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saat ini ibarat bara barang mahal.

Besar harapan agar Presiden mampu menciptakan ekosistem nasional yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas.

"Kita tantang Presiden beserta jajaran pemerintah pusat merealisasikan mimpi itu, bersama-sama membangun Super Koridor Ekonomi Pantura yang membawa maslahat bagi masyarakat dan mewujudkan perekonomian yang adil, seperti yang dikatakannya dalam sidang tahunan tadi," pungkasnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pelaksanaan APBN Tahun 2019
Kurang Memuaskan

Fraksi PKS Berikan Catatan Penting

"Fraksi PKS menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2019 masih kurang memuaskan sehingga berdampak tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1



H. Rofik Hananto, S.E.

Anggota Badan Anggaran
DPR RI dari Fraksi PKS

Terus Mengalami Peningkatan Beban Bunga Utang

PKS Ingatkan Pemerintah

“Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar utang yang dilakukan Pemerintah digunakan sesuai dengan peruntukannya secara efektif dan efisien

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (19/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI prihatin dengan peningkatan beban bunga utang dari tahun ke tahun, hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS Rofik Hananto, dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/08) dengan agenda Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019.

Rofik Hananto mengatakan prihatin terkait dengan peningkatan beban bunga utang dari tahun ke tahun.

“Realisasi beban bunga utang pada APBN 2018 sebesar Rp257,95 triliun meningkat menjadi Rp275,52 triliun pada APBN 2019, atau melonjak 6,81 persen.” Kata Rofik dalam sidang paripurna (18/08/2020)

“Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar utang yang dilakukan Pemerintah digunakan sesuai dengan peruntukannya

secara efektif dan efisien. Pemerintah masih perlu mengurangi kegiatan seperti paket-paket rapat, belanja perjalanan maupun perjalanan dinas dalam maupun luar negeri. Fraksi PKS mencatat realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri mengalami peningkatan pada tahun 2019.” Tambahnya

Selain itu, Fraksi PKS terus mendorong Pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran sektor yang lebih produktif dan berbasis kinerja dan value for money dengan perencanaan yang baik dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara.

“Jika perencanaan kurang baik, uang akan menumpuk, akan ada cost untuk idle money yang seharusnya tidak terjadi. Fraksi PKS mengkritisi terkait dengan realisasi anggaran belanja modal sebagai belanja

yang relatif produktif, mengalami susut 3,41 persen atau Rp6,28 triliun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp184,13 triliun menjadi Rp177,84 triliun pada Tahun Anggaran 2019.” Kata Anggota DPR RI Dapil Jateng VII ini.

Selain realisasi belanja modal, Fraksi PKS berpandangan berdasarkan sejumlah penelitian, bahwa belanja modal Pemerintah dapat mendorong terciptanya kesenjangan. Oleh sebab itu, pos belanja untuk pengentasan ketimpangan dan kemiskinan menjadi penting.

Fraksi PKS juga mencermati realisasi belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2019, dimana Belanja Barang dan Belanja Pembayaran Bunga Utang menduduki proporsi terbesar ke-2 dan ke-3 dalam Belanja Pemerintah Pusat dengan persentase 22,35 persen, dan 18,41 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa Belanja yang memiliki nilai strategis serta belanja untuk kesejahteraan rakyat pada Belanja Pemerintah Pusat belum menjadi prioritas.

Rofik menambahkan Fraksi PKS mendorong agar peningkatan belanja bantuan sosial tidak hanya pada masa



tahun PEMILU serta memastikan agar tepat sasaran. Pemerintah juga harus mendahulukan yang prioritas seperti kesejahteraan guru termasuk guru non ASN.

“Fraksi PKS mencermati realisasi Dana Tunjangan Guru

PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah), Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya”, terang Rofik.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kesejahteraan Petani Menurun

Johan Desak Pemerintah Fokus Perhatikan Nasib Petani

Hakikat dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor pertanian. Saat ini telah terbukti pertanian memiliki peranan besar untuk menyelamatkan kondisi perekonomian bangsa kita

H. Johan Rosihan, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

Kesejahteraan Petani Menurun

Johan Desak Pemerintah Fokus Perhatikan Nasib Petani

Hakikat dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor pertanian. Saat ini telah terbukti pertanian memiliki peranan besar untuk menyelamatkan kondisi perekonomian bangsa kita

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (12/08) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyatakan bahwa pada saat ini sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif selama kuartal II tahun 2020 di saat semua sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif.

Bahkan, menurut Johan, sektor pertanian meningkat paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, termasuk nilai ekspor pertanian meningkat pada saat terjadi penurunan ekspor pada hampir seluruh sektor.

"Namun, jika melihat indikator kesejahteraan petani terlihat perkembangan nilai tukar petani yang terus menurun pada saat ini dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya", ungkap Johan.

Atas situasi ini, Johan mendesak Pemerintah untuk lebih fokus memperhatikan nasib petani dan membuat orientasi pembangunan pertanian ke arah perbaikan kesejahteraan petani.

"NTP adalah indikator kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani", ujar Johan.

Politisi PKS ini menguraikan sejak tahun 2020 NTP selalu mengalami penurunan pada bulan yang sama dibandingkan tahun sebelumnya, contohnya pada

bulan Juli 2020 NTP nasional sebesar 100,09 yang jauh lebih rendah dibandingkan NTP Juli 2019 yang sebesar 102,63.

"Perbandingan ini menunjukkan indikator penurunan tingkat kesejahteraan petani karena menggunakan tahun dasar yang sama," urai Johan.

"Jadi, Pemerintah harus betul-betul mengerti mengapa kondisi petani makin memprihatinkan pada saat sektor pertanian telah menunjukkan pertumbuhan positif pada masa pandemi ini ketika pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32%," imbuhnya.

Legislator dari dapil NTB 1 ini ingin menekankan pada Pemerintah bahwa hakikat dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor pertanian.

"Saat ini telah terbukti pertanian memiliki peranan besar untuk menyelamatkan kondisi perekonomian bangsa kita", terang Johan.

Indikator keberhasilan Pemerintah ke depan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi namun



juga ditentukan oleh peningkatan pendapatan petani yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

"Tingkat kesejahteraan petani meningkat apabila daya beli pendapatan dari usaha tani meningkat," urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah dalam kondisi ekonomi di ambang resesi ini maka pentingnya kebijakan pertanian untuk menjaga stabilitas harga petani pada tingkat yang sesuai serta meningkatkan daya beli petani dan pendapatan rumah

tangga petani.

Johan menjelaskan bahwa pada Juli 2020 telah terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga di Indonesia sebesar 0,13 persen yang disebabkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran makanan dan minuman.

"Jadi dengan situasi ini, kebijakan ekonomi pertanian yang diterapkan harus mengarahkan kelangsungan usaha tani dan peningkatan produksi pertanian yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan petani," tutup Johan.

Kunjungan Reses ke Kabupaten Bone

Andi Akmal Serahkan Bantuan Motor Roda

Meskipun jumlah ini belum signifikan pada penyaluran alat tiap titik, tapi ini tidak berhenti di sini saja. Target semua adalah merata dulu. Semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan II terjangkau bantuan. Mudah-mudahan bantuan model seperti ini akan terus berlangsung

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Bone (13/07) — Hari-hari reses Anggota DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, terus memanfaatkan waktunya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.

Kali ini, Andi Akmal menyerahkan bantuan motor roda tiga dan tangki disinfektan kepada dinas lingkungan hidup Kabupaten Bone.

Sebelumnya, pada dua hari kemarin, Akmal berkeliling di Maros dan Bone untuk menyerahkan bantuan ikan olahan sebanyak seribu paket

yang merupakan program safari berkemah makan ikan antara anggota DPR RI dan Kementerian Kelautan Perikanan.

Kini, Akmal bersama kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan covid-19 dengan membekali dinas dengan alat bergerak disinfektan.

"Meskipun jumlah ini belum signifikan pada penyaluran alat tiap titik, tapi ini tidak berhenti di sini saja. Target semua adalah merata dulu. Semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan II terjangkau bantuan. Mudah-mudahan bantuan model seperti ini akan terus

berlangsung", tutur Andi Akmal. Politisi PKS ini menambahkan, bahwa jumlah bantuan, sebanyak 5 paket, yang diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2020.

Penyerahan Bantuan diserahkan kepada dinas didampingi langsung oleh anggota dprd Bone fraksi pks, Andi Irwan wirasasti, H. Askar dan Idris usman.

Selain Motor Roda Tiga dan tangki disinfektan, juga menyerahkan 1 unit motor Vitar di RS Tenriwaru Kabupaten Bone lengkap dengan semprotan disinfektan.

Politisi PKS ini berharap upaya yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat memberikan kontribusi nyata melawan covid-19 di daerah.

Akmal akan memperjuangkan setiap kabupaten di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II untuk mendapat peralatan yang sama sehingga ada pemerataan penanganan melawan Covid-19.

"Semoga Wabah ini Cepat berakhir dan masyarakat kembali bangkit baik fisik,



psikologis maupun ekonominya", Harap Akmal.

Legislator PKS yang duduk di DPR RI Komisi IV ini selain menyerahkan bantuan-bantuan pemerintah secara langsung, team yang ia bentuk di tiap kabupaten Kota yang tersebar di Sulawesi Selatan II ini juga tetap bekerja untuk menyalurkan bantuan paket-paket sembako maupun ikan olahan.

"Saya dalam menyalurkan bantuan ini tidak semua dapat di datangi satu persatu karena berkejaran waktu reses yang akan segera berakhir. Sementara lagi masuk masa sidang dan serapan aspirasi masyarakat baik dari tokoh hingga pemerintah daerah sudah tercatat sebagai bahan persidangan pekan depan", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Masa Reses

Andi Akmal Kembali Salurkan Paket Ikan Olahan di Dapilnya

Saya akan berusaha terus melakukan upaya untuk masyarakat ini. Bergantian daerahnya. Masih ada 5 6 Kabupaten kota lagi masih menunggu untuk saling sinergi membantu masyarakat, terutama di daerah Sulawesi Selatan II

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Makassar (12/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin konsisten untuk peduli pada warga masyarakat yang hingga saat ini masih terdampak covid-19.

Wujud kepeduliannya saat ini, diimplementasikan di dapilnya dengan membagikan paket olahan ikan yang nantinya dapat di sajikan pada keluarga terdampak.

"Wujud kepedulian itu banyak cara dan pola. Salah satunya ya kita terus berbagi kepada masyarakat. Sumbernya bisa dari dana pribadi atau dari upaya kerjasama dengan pihak pemerintah untuk bersinergi. Tujuannya tidak lain hanya

untuk menyelamatkan rakyat kita agar tetap survive dan tetap bersemangat", ujar Akmal.

Bukti wujud kepedulian yang dimaksud politisi PKS ini adalah dengan kembali membagikan 1.000 paket olahan ikan.

Pembagian tersebut disalurkan kepada warga di Kabupaten Maros 250 paket dan 750 paket di Kabupaten Bone.

Penerimaannya, warga terdampak Covid-19. Proses penyaluran paket bantuan ini juga dirangkaikan Safari Gemar Ikan yang dilaksanakan di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Rabu (12/08/2020).

Legislator asal Sulawesi

Selatan II ini berharap Program pembagian paket olahan ikan ini sebagai bentuk penanganan Covid-19 dan upaya penanganan stunting, sekaligus upaya kampanye makan ikan. Akmal juga berharap, paket olahan ikan tersebut bisa membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Mengonsumsi ikan baik untuk kesehatan masyarakat. Terlebih kandungan gizi dan protein pada ikan. Dan yang mendesak saat ini, sektor pertanian dan perikanan perlu diperkuat di tengah pandemi Covid-19," tutur Andi Akmal.

Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan, bahwa Walaupun di tengah Covid-19, sektor pertanian dan perikanan harus dipacu. Terbukti, sektor ini mengalami pertumbuhan di tengah pandemi

"Saya akan berusaha terus melakukan upaya untuk masyarakat ini. Bergantian daerahnya. Masih ada 5 6 Kabupaten kota lagi masih menunggu untuk saling sinergi membantu masyarakat, terutama di daerah Sulawesi Selatan II", tutup Andi Akmal Pasluddin.



Reses, Dimiyati Komitmen Sejahterakan Masyarakat

Saya melihat sekarang ada jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat, insentif guru ngaji, RT,RT dan pengadaan mobil operasional untuk desa, termasuk program BPJS untuk Linmas, kader dan perangkat RT,RW.

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH

Anggota Komisi III DPR RI

Pandeglang (14/08) — Hari ke-11 Reses atau jaring aspirasi masyarakat anggota DPR RI Dimiyati Natakusumah tetap komitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihan Banten 1 (Pandeglang-Lebak).

Pada reses yang digelar di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Pandeglang, pada Jumat 7 Agustus 2020, Dimiyati akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam hal hak kesejahteraan.

"Dulu waktu saya menjadi bupati Pandeglang dua periode

hampir 80 persen bantuan untuk masyarakat. Mulai dari ulama, kiai, guru ngaji, santri, perangkat desa mendapatkan insentif. Bahkan, saya pernah merintis program raskin gratis di Pandeglang," ujar Dimiyati.

Namun demikian, program tersebut juga sama dengan kepemimpinan bupati sekarang Hj. Irma Narulita.

"Ya, saya melihat sekarang ada jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat, insentif guru ngaji, RT,RT dan pengadaan mobil operasional untuk desa, termasuk program BPJS untuk Linmas, kader dan perangkat

RT,RW," ujarnya.

Selain itu, Dimiyati akan terus mendorong anggaran pemerintah pusat untuk kepentingan pembangunan di Pandeglang. Ini bertujuan agar semua sektor pembangunan bisa semakin maju.

Hadir dalam reses tersebut, Camat Majasari, Caswa, tokoh masyarakat, pemuda dan perangkat kelurahan Sukaratu se Kecamatan Majasari.



Hermanto Serahkan Bentor kepada Petani Hortikultura di Solok Selatan

Bantuan sarana pasca panen berupa kendaraan roda tiga ini merupakan wujud perhatian negara kepada petani hortikultura. Harapannya, petani bisa lebih cepat dalam mengangkut hasil panen dari kebun ke rumah dan selanjutnya dari rumah ke pasar

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Solok Selatan (13/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan, berkesempatan menyerahkan bantuan Pemerintah kepada petani di Kabupaten Solok Selatan.

Bantuan diberikan Anggota DPR dari Dapil Sumbar 1 itu kepada 2 kelompok tani (Poktan) yaitu Tuah Saiyo dan Melati.

"Bantuan sarana pasca panen berupa kendaraan roda tiga ini merupakan wujud perhatian negara kepada petani hortikultura. Harapannya, petani bisa lebih cepat dalam mengangkut hasil panen dari

kebun ke rumah dan selanjutnya dari rumah ke pasar", papar Hermanto.

Gunakan kendaraan ini, lanjut Hermanto, untuk keperluan utama yaitu mengangkut khususnya hasil panen hortikultura dan umumnya hasil pertanian lain.

"Disaat tidak dipakai untuk keperluan utama tersebut, silahkan digunakan untuk kebutuhan lainnya", ujar legislator FPKS ini.

Yang terpenting, katanya, kendaraan ini dikelola dan dirawat dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

"Kendaraan ini bisa menghasilkan uang. Dari hasil itu, sisihkan uang yang cukup untuk biaya perawatan kendaraan. Bila dirawat dengan baik tentu kendaraan ini akan berumur panjang", tutur Hermanto.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Hermanto didampingi oleh tokoh muda Solok Selatan Effendi Muharram.



Reses di Dapil,

Nevi Bantu Peternak dan Petani Implementasikan Ketahanan Pangan

Memang seharusnya Pemerintah mengoptimalkan anggaran yang pada hakikatnya dari rakyat untuk kepentingan rakyat. Masyarakat yang seharusnya berpotensi berkembang tapi terhambat permasalahan modal akan menjadi dapat solusi ketika pemerintah turun tangan

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Kota Pariaman (14/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, dimasa Reses ini bertemu para petani dan peternak di Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Selatan, Selasa (11/08/2020).

Bertemu dengan petani dan peternak yang tergabung dalam kelompok tani Pembangunan Desa Batang Tajongkek, Pariaman Selatan, Sumatera Barat ini, Politisi PKS ini menyerahkan bantuan program pemerintah untuk kelompok tani berupa Sapi dan instrumen pembuatan pupuk kandang senilai 200 juta rupiah.

"Ini bentuk implementasi

yang strategis ya untuk menunjang ketahanan pangan. Pada masa pandemi ini sangat penting upaya membangun kekuatan pangan kita karena hubungan kita dengan luar negeri sangat terbatas. Kita harus mengupayakan pangan yang kita produksi sendiri di dalam negeri. Kedepannya, bila kita berhasil membangun sistem ketahanan pangan, kita dapat mandiri berdaulat memenuhi kebutuhan pangan tanpa tergantung dari negara luar", urai Nevi.

olitisi asal Sumatera Barat II ini sangat bersyukur dapat menjadi perantara membantu

masyarakat dari program pemerintah.

"Memang seharusnya Pemerintah mengoptimalkan anggaran yang pada hakikatnya dari rakyat untuk kepentingan rakyat. Masyarakat yang seharusnya berpotensi berkembang tapi terhambat permasalahan modal akan menjadi dapat solusi ketika pemerintah turun tangan," tutur Nevi.

Nevi melanjutkan, bahwa ia juga sangat berterimakasih kepada masyarakat yang telah menerima kedatangannya. Bahkan aparat pemerintah tingkat kecamatan beserta jajarannya pun menyambut mendampingi untuk bertemu para petani dan peternak di kecamatan pariaman selatan.

"Saya berterima kasih kepada pak Suryadi, camat Pariaman Selatan, yang turut hadir pada penyerahan bantuan pemerintah memperkuat ketahanan pangan ini. Semoga kedepannya, bantuan-bantuan model seperti ini merata di tiap kecamatan di Indonesia yang memiliki potensi pengembangan ketahanan pangan", tutup Nevi Zuairina.



Bincang di Puspas Unair

Anis Motivasi Berinfak dan Ingatkan Pengelola agar Amanah

Dana sosial ini dikelola dan disalurkan dengan prioritas untuk keluarga besar Unair yang membutuhkan. pengelolaan dana sosial yang dilakukan melalui Lembaga ini, patut di contoh oleh universitas-universitas lain di Indonesia. Pengelolaan dana sosial melalui Lembaga, tentu lebih baik karena lebih terjamin akuntabilitasnya

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (14/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menjadi narasumber dalam acara Bincang Pagi Dengan Alumni yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga (Puspas Unair) Surabaya.

Dalam bincang pagi dengan alumni ini, Anis menyampaikan apresiasi terhadap Puspas Unair yang

bekerja mengelola dana sosial yang berasal dari berbagai unsur. Mulai dari dana zakat, infak, sodaqoh dan wakaf (ziswa) dari para donatur, dana CSR perusahaan, dan donasi dari lembaga-lembaga lain.

Dana sosial ini dikelola dan disalurkan dengan prioritas untuk keluarga besar Unair yang membutuhkan. Menurut Anis, pengelolaan dana sosial yang dilakukan melalui

Lembaga ini, patut di contoh oleh universitas-universitas lain di Indonesia.

"Pengelolaan dana sosial melalui Lembaga, tentu lebih baik karena lebih terjamin akuntabilitasnya," jelas Anis.

Lebih lanjut, ahli ekonomi Islam ini memberikan motivasi mengenai infak di dalam Islam.

"Infak yang dikeluarkan oleh seseorang tidak akan pernah mengurangi kekayaan yang dimilikinya," ungkapnya.

Oleh karenanya, tidak pernah ada cerita orang yang berinfak kemudian jatuh miskin. "Dan infak yang dikeluarkan oleh seseorang akan kembali kebaikannya kepada dirinya," tambahnya.

Oleh karenanya, orang yang berinfak selalu Allah tambahkan rizkinya.

Anis menegaskan bahwa infak bagi seorang muslim seharusnya tidak tergantung dari perintah, tapi hendaknya sudah menjadi karakter dan kebutuhannya. Sehingga infak



tidak mengenal status dan tingkat sosial seseorang. Jika sudah menjadi karakter, ia akan dilakukan oleh orang kaya maupun orang biasa.

Alumni universitas Airlangga ini, juga mengingatkan bahwa pengelola dana sosial/infak memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar bukan hanya dihadapan para donatur, tapi lebih besar lagi di hadapan Allah SWT.

Pengelola harus amanah menunaikan titipan yang diberikan sesuai dengan peruntukannya. Mereka harus benar-benar menjaga dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana sosial tersebut.

Di akhir perbincangan, Puspas Unair memperkenalkan bahwa mereka sedang menggagas berdirinya Griya Khadijah; merupakan tempat tinggal bagi mahasiswa yang memiliki target-target khusus, sehingga para mahasiswa tersebut selain meraih ilmu di universitas juga memiliki banyak skill yang dibutuhkan dalam hidupnya. Griya Khadijah memiliki motto "memulikan wanita dengan berkarya".

Anis sangat bersyukur dengan kehadiran program yang inovatif ini dan menawarkan kontribusinya untuk kemajuan Griya Khadijah khususnya dan Puspas Unair umumnya.

Sakinah Dorong Pengembangan Wisata Religi Kawasan SIS Aljufri Sulawesi Tengah

“Kegiatan pariwisata religi dan ekonomi kreatif dibuka satu hari penuh dari pagi sampai malam, berhenti saat waktunya sholat. Ini akan mendatangkan kunjungan wisatawan domestik. Kegiatan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata religi akan tumbuh, memberdayakan masyarakat lokal

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (15/08) — Wisata religi menjadi perhatian serius anggota Komisi X DPR RI dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, saat melakukan kunjungan resesnya di Dinas Pariwisata Provinsi Palu, belum lama ini.

Sakinah mendorong agar kawasan wisata religi di kawasan Sis Aljufri untuk dikembangkan lebih serius lagi.

“Kawasan Sis Aljufri saat ini hanya sebatas tagline saja, namun tidak ada aksi yang menunjukkan sebagai kawasan wisata religi. Geliat dari kawasan religi itu sendiri tidak terlihat,” kata anggota komisi X DPR RI dapil Sulawesi Tengah.

Masyarakat bertanya-tanya konsep kawasan religi ini

seperti apa?. Padahal kegiatan wisata religi di kawasan Sis Aljufri dapat mendatangkan income di bidang pariwisata yang signifikan.

Sakinah mendorong dinas pariwisata mengembangkan kawasan Sis Aljufri dengan kegiatan-kegiatan bernuansa religi yang dapat meningkatkan geliat ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal.

“Saya usulkan setiap Jumat pagi jalan SIS Aljufri ditutup untuk kendaraan bermotor, kemudian digelar berbagai kegiatan yang bernuansa islami dan ekonomi kreatif. Ada panggung bedah buku, panggung piladcal, pameran kaligrafi, cerdas

cermat, hafalan al-quran dan lain sebagainya,” ungkap Sakinah.

Lebih rinci Sakinah memaparkan bahwa kegiatan religi dan ekonomi kreatif dilaksanakan sehari penuh dari pagi hingga malam setiap hari Jumat dan digelar setiap pekan.

“Kegiatan pariwisata religi dan ekonomi kreatif dibuka satu hari penuh dari pagi sampai malam, berhenti saat waktunya sholat. Ini akan mendatangkan kunjungan wisatawan domestik. Kegiatan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata religi akan tumbuh, memberdayakan masyarakat lokal,” kata wanita yang merupakan cucu Habib Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri, atau biasa disebut Guru Tua pendiri lembaga pendidikan Islam Alkhairaat pada tahun 1930 silam.

Sakinah pun menuturkan sebagai Anggota Komisi X yang membidangi pariwisata memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan pariwisata termasuk wisata religi.



Anak Depok jadi Kurir Narkoba

Nur Azizah: Pemkot Perlu Segera Selesaikan

Pemkot Depok harus segera merumuskan secara komprehensif membina anak, menciptakan iklim yg kondusif anak beraktivitas positif, mencegah anak beraktivitas negatif termasuk terlibat dengan narkoba, dan mengantarkan anak-anak menjadi aset pemimpin bangsa

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Depok (15/08) — Dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid, mendatangi Polsek Cimanggis guna serap Aspirasi.

Dalam kesempatan kali ini, Nur Azizah menemukan permasalahan kenakalan remaja dan eksploitasi anak di Depok semakin memprihatinkan dan butuh perhatian lebih.

"Permasalahan semakin kompleks karena fenomena eksploitasi anak yang menjadi kurir narkoba di Depok masih terus terjadi hingga saat ini," ungkap Nur Azizah.

"Tidak sedikit anak-anak

yang berawal hanya menjadi kurir ini lama-lama juga menjadi pemakai bahkan masuk ke dalam jaringan pengedar, itu sangat memprihatinkan," imbuhnya.

Reses yang digelar, Jumat (31/07/2020), dihadiri oleh Ade Supriatna, Anggota DPRD Fraksi PKS Kota Depok yang juga turut berdialog bersama Nur Azizah dan Kapolsek Cimanggis AKP Agus Khaeron.

Khaeron selaku Kapolsek Cimanggis menjelaskan bahwa fenomena eksploitasi anak dalam peredaran narkoba ini masih terus dalam pemantauan Polsek Cimanggis.

"Saat ini saja ada 15 tahanan anak yang dititipkan di Polsek Cimanggis, sebagiannya karena jadi kurir narkoba" jelas Khaeron.

Khaeron menyampaikan bahwa rata-rata anak-anak yang menjadi kurir ini diberi upah berkisar 25 ribu hingga 50 ribu rupiah sekali jalan.

Tidak hanya itu, belakangan ini menurut Khaeron mereka justru diupah dengan narkoba untuk dipakai bersama-sama.

"Kecenderungan upahnya bukan lagi uang tapi jadi memakai narkoba, misalnya beli 1 chi dibagi 3, 1 dipakai bareng, 2 dijual. Satu chi kurang dari 1 gram" ungkap Khaeron.

Nur Azizah melanjutkan, fakta baru ini menjadi menjadi teguran keras bagi pemerintah setempat (Pemerintah Kota Depok).

Nur Azizah menegaskan bahwa pemerintah maupun masyarakat harus sangat sadar pentingnya pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur. Narkoba dapat menghancurkan masa depan anak-anak khususnya di kota Depok.

"Pemkot Depok harus



segera merumuskan secara komprehensif membina anak, menciptakan iklim yg kondusif anak beraktivitas positif, mencegah anak beraktivitas negatif termasuk terlibat dengan narkoba, dan mengantarkan anak-anak menjadi aset pemimpin bangsa," terang Nur Azizah.

Fenomena eksploitasi anak ini menjadi perhatian khusus bagi Nur Azizah sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga menangani problematika terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Nur Azizah mengaku sangat prihatin dan akan terus memperjuangkan perlindungan dan hak-hak anak di parlemen.

Menurut Nur Azizah anak-anak yang menjadi tonggak pembangunan negeri haruslah terpenuhi hak-hak nya secara optimal.

Nur Azizah juga menjelaskan bahwa eksploitasi anak-anak di Depok juga terjadi pada pengamen ondel-ondel yang banyak mempekerjakan anak-anak dibawah umur.

"Terkait Permasalahan ini, selain saya berharap agar Pemerintah Kota Depok segera menerbitkan, insya Allah saya segera akan berdialog dengan Komnas Perlindungan Anak Indonesia" pungkas Nur Azizah mengakhiri.

Akhir Masa Reses

Slamet Bagikan 10 Ton Kol Gratis untuk Warga Sukabumi

Sayuran kol tersebut dibeli dari petani kol di Sukaraja yang saat ini tengah mengalami keterpurukan akibat harga jual yang anjlok. 10 kol tersebut dibagikan di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Ini bentuk empati kita dan juga kita ingin berbagi kepada masyarakat lainnya

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (15/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet membagikan 10 ton sayuran kol gratis kepada warga Sukabumi.

Slamet mengatakan, sayuran kol tersebut dibelinya dari petani kol di Sukaraja yang saat ini tengah mengalami keterpurukan akibat harga jual yang anjlok. 10 kol tersebut dibagikan di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

"Ini bentuk empati kita dan

juga kita ingin berbagi kepada masyarakat lainnya," kata Slamet kepada media, Sabtu (15/08).

Sebelumnya diketahui, petani kol di Kampung Sukanangon Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi harus menelan pil pahit saat harga jual produk sayuran mereka jauh dari harapan.

Ditemui di lokasi, salah seorang petani bernama Ali Rahmat (34 tahun)

mengatakan, saat ini harga jual sayuran kol yang ia tanam berada di titik terendah. Ali menyebut, harga pasar sayur kol saat ini hanya Rp 700 per kilogram. Sementara itu, modal para petani sendiri mencapai Rp 1.200 per kilogram.

"Jadi walaupun kita panen, habis untuk biaya panen sekitar Rp 350 per kilogram, belum ongkos. Di tingkat petani hanya terima Rp 200 per kilogram," kata Ali, Kamis (13/08/2020).



Bukhori Salurkan Ratusan Paket Bantuan Bagi Lansia, Perempuan, dan Anak

“Alhamdulillah kami baru saja selesai menyerahkan 200 paket bantuan hari ini. Paket bantuan berupa bahan pangan dan sandang yang khusus diperuntukan untuk perempuan, lansia, dan anak ini semata-mata untuk memacu perbaikan kesehatan

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Semarang (19/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyalurkan ratusan paket bantuan untuk anak, perempuan, dan lansia yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang.

Paket bantuan tersebut disalurkan dengan menggendong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) dan Organisasi Salimah Kota Semarang.

Paket bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat terdiri dari sejumlah kebutuhan primer bagi anak, perempuan, dan lansia seperti susu, bahan pangan, popok,

minyak telon, vitamin, masker, sarung tangan pembersih, dan sabun antiseptik. Bantuan tersebut diserahkan di Balai Kelurahan Sumurboto Banyumanik Kota Semarang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Alhamdulillah kami baru saja selesai menyerahkan 200 paket bantuan hari ini. Paket bantuan berupa bahan pangan dan sandang yang khusus diperuntukan untuk perempuan, lansia, dan anak-anak ini semata-mata untuk memacu perbaikan kesehatan. Kegiatan yang diselenggarakan

atas kerjasama dengan KP3A ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, yakni bisa diakses dan dirasakan penuh manfaatnya oleh mereka” ungkap Bukhori selepas menghadiri prosesi penyerahan bantuan secara virtual di Jakarta, Selasa (18/08/2020).

Politisi dapil Jateng 1 ini turut menyinggung sejumlah kelemahan dari program jaring pengaman sosial yang telah didelegasikan oleh pemerintah, misalnya masalah pendataan, ketepatan sasaran, dan penyimpangan bantuan sosial di tingkat hilir.

“Meskipun ada cukup banyak program dari pemerintah, ada banyak juga keluhan dari masyarakat. Misalnya, kasus program bansos yang mangkir di tengah jalan dimana dalam proses belanjanya terdapat intervensi dari sejumlah oknum. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kerja serius agar masyarakat bisa merasakan kehadiran negara” sambungnya.



Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII ini menjelaskan, jumlah orang miskin sebelum pandemi berkisar 29 juta jiwa jika mengacu pada garis kemiskinan dengan indikator penghasilan harian sekitar 1USD (dollar) atau setara Rp 14.000-15.000.-.

Namun, sejak terjadinya pagebluk jumlah kelompok rentan miskin banyak yang bergeser menjadi kelompok miskin akibat kehilangan sumber penghasilan. Alhasil, jumlah mereka kini berada di kisaran 140 juta jiwa. Dengan mencermati angka statistik tersebut, lanjutnya, jaring pengaman sosial dari pemerintah masih belum cukup memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori mengapresiasi

kinerja KP3A yang telah memberikan perhatian serius sebagai representasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Selain itu, ia juga berkomitmen untuk mendukung peningkatan anggaran KP3A untuk Tahun Anggaran 2021.

“Kendati anggarannya masih terbilang kecil, kami sangat mengapresiasi kinerja KP3A. Sebab itu, Fraksi PKS akan mendukung peningkatan anggaran bagi KP3A, bukan semata karena bantuan ini, tetapi mengingat ruang lingkup kerja kementerian ini cukup luas, baik pada sisi kesehatan, perlindungan, dan pemberdayaan dimana semua itu dilakukan dalam rangka pemulihan kepada perempuan” pungkasnya.

Masyarakat Disabilitas Terdampak Covid-19,

Netty: Negara Lalai Penuhi Hak Mereka

"Saat reses lalu, saya bersilaturahmi dengan teman-teman disabilitas tuna netra, mendengarkan keluhan dan aspirasinya. Mereka mengeluhkan masih belum mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, layanan kependudukan dan kesejahteraan. Saking sulitnya, kadang mereka pasrah dan memilih untuk berjuang sendiri dan berkelompok

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (16/08) — Pandemi Covid-19 berimbas pada siapa saja, termasuk penyandang disabilitas. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani Aher meminta Pemerintah menjamin kehidupan warga negara dengan disabilitas.

"Negara belum memperhatikan hak penyandang disabilitas di masa pandemi ini. Mereka belum mendapatkan paket bantuan mau pun jaring pengaman sosial lainnya. Seharusnya mereka diprioritaskan mendapatkan dukungan, mengingat keterbatasan kondisi fisiknya. Sayang sekali, kebijakan inklusif negara masih sebatas retorika. Pemerintah lalai memperhatikan

mereka," ungkap Netty.

Menurut Netty, hingga hari ini kelompok disabilitas masih kesulitan mendapatkan akses pekerjaan, kesehatan dan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Saat reses lalu, saya bersilaturahmi dengan teman-teman disabilitas tuna netra, mendengarkan keluhan dan aspirasinya. Mereka mengeluhkan masih belum mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, layanan kependudukan dan kesejahteraan. Saking sulitnya, kadang mereka pasrah dan memilih untuk berjuang sendiri dan berkelompok. Selain itu, stigma buruk terhadap penyand

ang disabilitas dan keluarganya masih diterima baik dalam interaksi sosial di masyarakat maupun di dunia kerja," papar adeg dapil Jabar VIII ini.

Badan Pusat Statistik pada 2019 mencatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 34 juta jiwa. Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal, baik perdagangan mau pun jasa.

Dalam kondisi normal saja, pendapatan mereka tidak menentu, apalagi dalam situasi pandemi," ujar politisi PKS ini.

Survei Jaringan Disabilitas Indonesia menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang sangat serius, di mana sekitar 86 persen responden (1.447 difabel) yang bekerja di sektor informal mengalami pengurangan pendapatan sekitar 50 sampai 80 persen selama wabah corona terjadi. Per Juni 2020, Dirjen Rehabilitasi Sosial mengklaim sudah menyalurkan bantuan sembako bagi 377 Ribu warga penyandang disabilitas.

"Sangat kurang memadai dibandingkan jumlah mereka yang ada 34 juta. Seharusnya pemerintah mendahulukan menolong para penyandang disabilitas agar dapat bertahan di tengah pandemi. Saya minta



pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam memenuhi hak mereka," ujarnya.

Netty juga menyoroti masih belum optimalnya proses sosialisasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas. "Seharusnya ada edukasi dan pendampingan khusus bagi mereka, baik terkait pencegahan Covid-19, mau pun upaya membangkitkan ekonominya. Bahkan perlu dipikirkan pula sistem pendidikan dan proses PJJ bagi penyandang disabilitas yang masih bersekolah, baik di tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Mereka pasti mengalami kesulitan sarana

mau pun akses," papar Ketua Tim Covid-19 FPKS ini.

"Saya menagih pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait. Saya minta pemerintah dan swasta segera memberikan pelatihan (up-skilling dan re-skilling) kepada mereka. Implementasikan kuota khusus disabilitas dalam dunia kerja, serta berikan mereka kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berkarya. Mereka tidak meminta dikasihani, mereka hanya minta diperlakukan setara dengan warga negara lainnya, agar mereka berdaya," tutup Netty.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Teddy Setiadi: KASN Jangan Dihapus, Harusnya Diperkuat

"KASN itu adalah ruh dari UU ASN. Kita ingin agar ASN diisi oleh orang-orang yang tepat, tidak karena kedekatan dan keberpihakan. Sementara ini membutuhkan KASN sebagai pengawas dan track record mereka sangat baik. Jadi tidak tepat kalau KASN dihapuskan"

Teddy Setiadi, S.Sos.
Anggota Komisi II DPR RI



Teddy Setiadi: KASN Jangan Dihapus, Harusnya Diperkuat

“KASN itu adalah ruh dari UU ASN. Kita ingin agar ASN diisi oleh orang-orang yang tepat, tidak karena kedekatan dan keberpihakan. Sementara ini membutuhkan KASN sebagai pengawas dan track record mereka sangat baik. Jadi tidak tepat kalau KASN dihapuskan”

TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (18/08) - Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menolak penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam revisi UU ASN. Padahal, KASN memainkan peran yang cukup strategis dalam mengawasi proses perekrutan ASN, dan menjaga netralitas ASN. Apalagi, track record KASN sudah cukup baik.

“KASN itu adalah ruh dari UU ASN. Kita ingin agar ASN diisi oleh orang-orang yang tepat, tidak karena kedekatan dan keberpihakan. Sementara ini membutuhkan KASN sebagai pengawas dan track record mereka sangat baik. Jadi tidak tepat kalau KASN dihapuskan” ujar Teddy Setiadi saat menerima perwakilan KASN di Jakarta, Selasa (18/08).

Selama ini, birokrasi selalu

dikeluhkan sebagai institusi negara yang tidak profesional dan tidak netral. Teddy berpendapat bahwa merit system dalam birokrasi adalah penting untuk memastikan agar pemerintahan dapat berjalan baik. KASN adalah kunci untuk dapat menegakkan merit system dalam birokrasi.

“Reformasi birokrasi saat ini masih jalan di tempat. Adanya KASN justru diharapkan dapat mempercepat proses tersebut” ujar Teddy.

Apalagi, menurut Teddy, tantangan KASN semakin berat. Pilkada 2020 yang akan berlangsung Desember nanti akan melibatkan 250 kepala daerah petahana. Hal ini akan mempengaruhi netralitas ASN dalam Pemilu, karena adanya kecenderungan petahana untuk

memobilisasi ASN agar terpilih kembali. Oleh karena itu, Teddy mendukung penuh penguatan KASN.

“Dengan tantangan seberat itu, harusnya KASN diperkuat, karena kalau tidak diperkuat tata kelola pemerintahan akan sulit” ujar Teddy.

Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto meminta Fraksi PKS untuk mendukung penguatan KASN. Menurut Agus, tugas KASN sangatlah berat dalam mengawasi birokrasi sementara wewenang dan SDM terbatas, terutama di daerah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami berharap agar PKS dapat mendukung penguatan KASN demi birokrasi yang lebih baik” ujar Agus.



*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Perkuat Komitmen Etika Berbangsa dan Bernegara

HNW Usul MPR Bentuk Mahkamah Kehormatan

Dengan penegakan kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara tersebut, lanjut HNW, maka diharapkan para penyelenggara negara, termasuk di MPR, semakin terdorong untuk semakin amanah dalam melaksanakan amanat Rakyat

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (13/08) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengusulkan, agar MPR sebagai Lembaga yang sudah Membuat TAP MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, agar juga serius merealisasikan ketentuan soal Etika, melalui pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis.

Pembentukan Mahkamah ini, menurut HNW, juga sebagai respons kongkrit atas kesepakatan MPR dengan KY (Komisi Yudisial) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang akan menelen-

ggarkan Konvensi Nasional ke II tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

"MPR RI pada tahun 2001, saat masih menjadi Lembaga Tertinggi Negara telah membuat TAP MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, harusnya memang tak ketinggalan dalam komitmen beretika salah satunya dalam pembentukan badan penegakan Etika, karena DPR dan DPD, dua lembaga legislatif yang lain, malah sudah membentuknya," papar Anggota Komisi VIII DPR ini.

DPR, lanjut HNW, mempunyai Mahkamah Kehormatan Dewan, dan DPD mempunyai

Dewan Kehormatan Dewan (DKD).

"Karenanya seharusnya bila MPR RI segera membentuk Lembaga sejenis, misalnya dengan nama Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM)," imbuhnya.

HNW menambahkan, memang semua anggota MPR adalah sekaligus anggota DPR atau anggota DPD. Tetapi ada berbagai kegiatan yang khas di MPR, diikuti oleh anggota MPR sebagai anggota MPR, dan itu tidak terdapat di DPR atau DPD.

"Misalnya kegiatan terkait sosialisasi 4 pilar MPR, kegiatan di Badan-badan MPR serta kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR terkait pengkajian/pelaksanaan/perubahan terhadap UUD, Tata Tertib MPR dan lain-lain," terang HNW.

Dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan tersebut, katanya, MPR menghadirkan komitmen lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuatnya sendiri, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat MPR sebagai lembaga pemu-



syawaran rakyat, dan marwah Pimpinan serta Anggotanya dan Lembaga MPR-nya.

"Sebagaimana diketahui, berbagai lembaga Negara telah memiliki lembaga penegak kode etik. Komisi Yudisial (KY) telah memiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), DPR RI memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), begitu juga DPD yang memiliki Badan Kehormatan Dewan (BKD), hingga Komite Etik/Dewan Pengawas KPK RI," ujarnya.

Dengan penegakan kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara tersebut, lanjut

HNW, maka diharapkan para penyelenggara negara, termasuk di MPR, semakin terdorong untuk semakin amanah dalam melaksanakan amanat Rakyat.

"Hal ini tentu bisa meminimalisir kasus pelanggaran hukum yang bermula dari pelanggaran etik, sehingga berbagai kasus pelanggaran etik tak terjadi sehingga tak perlu lagi dihadapkan dengan peradilan umum", tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI